

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI  
PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL  
PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA KRINJING  
KECAMATAN WATUMALANG  
KABUPATEN WONOSOBO**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

Mohamad Singgang Saputra

1601046040

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima)

Hal : Persetujuan Proposal Skripsi

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Mohamad Singgang Saputra

NIM : 1601046040

Jurusan : PMI

Judul Proposal: **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA KRINJING, KECAMATAN WATUMALANG, KABUPATEN WONOSOBO**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.wb*

Semarang, 12 Maret 2020

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang metodologi & Tatatulis

**Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag.**

Tanggal :

**Sulistio, S.Ag, M.Si**

Tanggal :

SKRIPSI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA BINAAN  
DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA KRINJING KECAMATAN  
WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

Disusun Oleh:

Mohamad Singgang Saputra

1601046040

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 17 Juni 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Safrodin, M.Ag

NIP. 19751203 200312 1 002

Penguji III

Suprihatiningsih, S.Ag.,M.Si.

NIP. 19760510 200501 2 001

Sekretaris/Penguji II

Sulistio, S.Ag.,M.Si.

NIP. 19700202 199803 1 005

Penguji IV

Dr. Agus Riyadi, M.Si

NIP. 19800816 200710 1 003

Mengetahui

Pembimbing I

Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag.

NIP. 19690830 199803 1 001

Pembimbing II

Sulistio, S.Ag.,M.Si.

NIP. 19700202 199803 1 005

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 29 Juni 2020



Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.

NIP. 19720410 200112 1 003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaa di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Maret 2020

Materai 6000

Mohamad Singgang Saputra

NIM: 1601046040

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji syukur bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada beliau, junjungan nabi agung, nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang mu'min yang mengikutinya.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” tidak terlepas dari bantuan, semangat dan dorongan baik material maupun spritual dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah merestui penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sulistio, S.Ag.,M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hatta Abdul Malik, S.Sos.I, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak Drs.H. M. Mudhofi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Sulistio, S.Ag.,M.Si. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah membimbing, mengarahkan mengkritik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama dalam masa perkuliahan.
6. Staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Staf karyawan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Staf pemerintahan Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan dengan tulus membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, melainkan hanya untai terima kasih yang tulus dan do'a semoga Allah SWT mencatat amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Aamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, terutama dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Semarang, 22 Maret 2020

Penulis,

Mohamad Singgang S

1601046040

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suwardi dan Ibu Kasrumiyati yang senantiasa menjadi sosok terhebat bagi penulis. Sosok yang menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis. Sosok yang tidak pernah lelah mendidik, membimbing, dan mencurahkan segala kasih sayangnya tanpa pamrih kepada penulis.
2. Kakak- kakak saya yang selalu memberikan nasehat dan semangatnya kepada penulis.
3. Sedulur KSK WADAS yang sudah banyak mengajarkan banyak hal kepada penulis.
4. Segenap Grup Karawitan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan dedikasinya kepada penulis.
5. Almamater saya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat penulis dalam *tholabul Ilmi*.

## MOTTO

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً  
فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat”

(HR. Bukhari)



## ABSTRAK

Nama: Mohamad Singgang Saputra, NIM: 1501046040. Judul Skripsi: “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Pembimbing Drs.H. M. Mudhofi, M.Ag. dan Sulistio, S.Ag.,M.Si. Semarang: Program Strata 1 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 2020

Banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan kemiskinan, mulai dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya pengalaman dalam bidang usaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia mengandung upaya menghapuskan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Oleh karena itu dalam pengembangan sumberdaya manusia salah satu program yang harus dilaksanakan adalah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan Program Desa Binaan. Program Desa Binaan diaktualisasikan pada beberapa kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penulis mengangkat rumusan masalah berupa: 1) Bagaimana Pelaksanaan Program Desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo? 2) Bagaimana hasil Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo?

Metode dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima program, sedangkan obyek dari penelitian ini adalah Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dengan analisis data dari Mather B. Miles dan A. Michael Huberman. Peneliti mengumpulkan data-data, arsip-arsip yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan kemudian direduksi, disajikan dan dirangkum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Pelaksanaan Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah memiliki tahapan-tahapan kesejahteraan sosial diantaranya. Tahap perencanaan berupa penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan dengan cara menggali potensi desa dan menentukan program penanggulangan kemiskinan, tahap pelaksanaan dan pendampingan berupa pemberian pelatihan-pelatihan seperti, Pembentukan Satgas Desa Adat, Fasilitas Regulasi Desa, Fasilitas Penyusunan Profil Desa, Evaluasi Diri Desa, Pemberian Bantuan Operasional KPMD, Pemberian Bantuan Ketahanan Masyarakat Desa, Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, Fasilitasi Sistem Informasi Desa, dan tahapan evaluasi sudah sesuai dengan tahapan program Desa Binaan. 2) Hasil Program Desa Binaan di Desa Krijing sudah berjalan dengan baik. Capaian tersebut dilihat dari indikator-indikator kesejahteraan sosial yaitu Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan berupa memberikan pelatihan dan pendampingan memberikan pelatihan kerajinan glagah, kerajinan sapu lidi, kerajinan membuat, kerajinan dari kantong plastik bekas, pengolahan kopi arabika, kesehatan seperti membangun

jambanisasi bagi masyarakat yang belum mempunyai jamban, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

Kata kunci: Peningkatan, Kesejahteraan, Desa Binaan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>V</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masala .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH</b>	
A. Kesejahteraan Masyarakat .....	18
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .....	18
2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat .....	20
3. Fungsi- fungsi Kesejahteraan Sosial .....	21
4. Usaha Kesejahteraan Sosial .....	22
5. Nilai dan prinsip dalam praktik kesejahteraan sosial .....	24
B. Desa Binaan .....	26
1. Pengertian Desa Binaan .....	26

2. Tahapan Pelaksanaan Desa Binaan .....	27
3. Tujuan Desa Binaan .....	29

**BAB III PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI  
PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI  
JAWA TENGAH DI DESA KRINJING KECAMATA WATUMALANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

A. Letak Geografis .....	30
B. Profil Dispermades Dukcapil .....	33
1. Sejarah dan Perkembangan Berdirinya Dispermades Dukcapil .....	33
2. Visi dan Misi Dispermades Dukcapil .....	34
3. Tujuan dan Sasaran Dispermades Dukcapil .....	34
4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dispermades Dukcapil .....	36
5. Struktur Organisasi Dispermades Dukcapil .....	37
C. Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo .....	39
D. Bagaimana Hasil Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krinjing Kecamatan watumalang Kabupaten Wonosobo .....	43

**BAB IV ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL  
PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA KRINJING KECAMATAN  
WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO**

A. Pelaksanaan Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo ..	53
B. Hasil Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
C. Penutup .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Peta Desa Krinjing .....	30
<b>Gambar 2</b> Intervensi Dispermades Dukcapil .....	44
<b>Gambar 3</b> Pendampingan Pembuatan Sapu Glagah .....	45
<b>Gambar 4</b> Pendampingan Kerajinan Bunga Plastik .....	46
<b>Gambar 5</b> Pendampingan Pelatihan Membatik .....	47
<b>Gambar 6</b> Pendampingan Olahan Kopi Arabika .....	48
<b>Gambar 7</b> Pendampingan Kerajinan Plastik .....	49

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel. 1</b> Tingkat Pendidikan Desa Krinjing .....	31
<b>Tabel. 2</b> Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Krinjing .....	32
<b>Tabel. 3</b> Jumlah Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan Desa Krinjing .....	32
<b>Tabel. 4</b> Daftar Warga yang Diberdayakan .....	50

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral (sholeh 2010). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional (Hamudy 2008). Menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lainnya yang biasa digunakan adalah menurut *Eupen Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Khomsan, dkk. 2015: 2).

Pada Konferensi PBB terkait pengembangan sosial, Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan sebagai “Kondisi yang ditandai oleh kehilangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi”. Menurut Suparlan (1995), kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Khomsan, dkk. 2015: 2).

Chamber dalam Nasikun (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu (1) kemiskinan (*poverty*), (2) Ketidak berdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam



kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti; tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Khomsan, dkk. 2015: 3).

Menurut Chambers dalam nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu (1). Kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawan garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. (2). Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. (3). Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. (4). Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan (Khomsan, dkk. 2015: 3).

Kemiskinan menurut Bappenas dalam Asep Saefudin, Dkk (2003: 4) adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai pada taraf yang manusiawi. Kemiskinan pada negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh adanya pengangguran, banyak faktor yang memicu kemiskinan pada negara berkembang antara lain: kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam yang terbatas, kualitas pendidikan dan kualitah kehidupan yang rendah. Umumnya faktor tersebut dijumpai di pedesaan, desa atau pedesaan adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya (Nurcholis. 2011: 4).

Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia mengandung upaya menghapuskan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Oleh karena itu dalam pengembangan sumberdaya manusia salah satu program yang harus dilaksanakan adalah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan. Tidak mudah untuk membangun pengertian kemiskinan karena menyangkut berbagai macam dimensi. Dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, politik (Effendi. 1995: 249-252).

Berikut ini dibahas dimensi kemiskinan: (1). Kemiskinan ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan kelompok-kelompok baku. (2). Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar peningkatan produktivitas seseorang meningkat (Tajjudin Noer Effendi. 1995: 249-252). (3). Kemiskinan politik menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial (politik) yang dapat menentukan alokasi sumberdaya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi sumberdaya (Effendi. 1995: 249-252).

Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006: 132) menunjuk 9 yang menandai kemiskinan: (1). Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan); (2). Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; (3). Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil); (4). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber daya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air); (5). Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum); (6). Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan; (7). Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan

transportasi); (8). Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat); (9). Ketidakterlibatan dalam kegiatan soasial masyarakat (Suharto. 2013: 14-15).

Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Sunartiningsih. 2004: 80).

Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sekian banyaknya program pemerintah terdapat satu usaha yang sudah diselenggarakan dan masih tetap dikembangkan karena banyak memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu program desa binaan.

Menurut James Midgley dalam Miftachul Huda (2009: 72) mengidentifikasi kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: (1). Ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; (2). Ketika kebutuhan terpenuhi; dan (3). Ketika peluang sosial terbuka secara maksimal. Kesejahteraan sosial pada masyarakat diawali pada unit terkecil, yaitu kesejahteraan pada keluarga, keluarga sangat penting posisinya dalam kehidupan masyarakat, karena keluarga adalah lingkungan pertama dalam bersosialisasi dalam hidup seseorang, Kesejahteraan keluarga meliputi kesejahteraan sandang, pangan dan papan yang merupakan suatu kewajiban utama yang harus dicukupi dalam kehidupan sehari-hari. Prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok kurang beruntung, khususnya keluarga miskin, dimana dalam kesejahteraan sosial ini, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Huda. 2009: 72).

Salah satu indikasi perubahan yang bersifat kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Gambaran paling sederhana untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan adalah dengan melihat apakah perubahan tersebut dapat berdampak pada semakin banyak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Semakin

banyak kebutuhan yang terpenuhi merupakan indikasi semakin meningkat kesejahteraan atau taraf hidup masyarakatnya (Huda. 2009: 73).

Dalam pembangunan masyarakat berbagai dimensi kebutuhan tersebut perlu dipertimbangkan dan diakomodasi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan akan merupakan kesejahteraan yang penuh baik fisik, mental maupun sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang penuh tersebut tentu dibutuhkan proses perubahan dalam berbagai dimensi kesejahteraan yang yang diharapkan (Soetomo. 2013: 14).

Masalah kemiskinan selalu ditandai dengan adanya kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk menyampaikan inspirasi. Pada masyarakat miskin kondisi ini diperparah dengan para pembuat kebijakan dan program mengabaikan perbedaan kondisi dan kemampuan berbagai elemen masyarakat di dalamnya, termasuk laki-laki dan perempuan. karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak sosial politik dan kesempatan yang sama, untuk meningkatkan diri dan kesejahteraan hidupnya (Rais. 1995: 9).

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial” (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dalam melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat instansi-instansi sosial. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatakan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Fahrudin. 2012 : 11).

Perubahan yang dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kemudahan dalam mengakses informasi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga masih banyak program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat semestinya tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, namun pada tahap perencanaan sampai tahap evaluasi sehingga menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek sasaran program melainkan sebagai subjek dan objek. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan koordinasi.

Nilai-nilai dakwah bilhal juga di transformasikan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dakwah bilhal merupakan dakwah dengan aksi nyata. Dakwah ini dilakukan dengan membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Dakwah bilhal diantaranya pemberdayaan masyarakat dengan metode kelembagaan (Aziz. 2004: 378). Secara harfiah, dakwah bilhal berarti menyampaikan ajaran islam dengan amaliyan nyata. Dalam pengertian yang luas dakwah bilhal dimaksudkan sebagai keseluruhan mengajak orang secara sendiri maupun kelompok-kelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan islam, yang berarti banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah (Sagir. 2015:18). Nilai-nilai dakwah yang dilakukan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah diantaranya memberikan pendampingan, pembinaan, dan memberikan fasilitas secara langsung.

Desa Binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dispermades Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah, bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah provinsi mengencarkan berbagai terobosan mulai dari pendataan hingga membentuk desa binaan untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Desa kringing

adalah salah satu desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kegiatannya adalah mengurangi angka kemiskinan di desa Krinjing, dari 777 kk miskin setelah di verifikasi dan pengecekan ke lapangan berkurang sekitar 193 kk antara lain karena sudah mampu, meninggal dan pindah, namun demikian ada 57 kk miskin yang selama ini tidak masuk data miskin.

Kemiskinan yang terjadi di Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana desa, Tingkat pengangguran masyarakat yang masih relatif tinggi, tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, kurangnya keterampilan dalam mengembangkan potensi lokal, dan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai jamban.

Sehingga DispermadesDukcapil Provinsi Jawa Tengah memberikan program Desa Binaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat desa. Melalui Dispermades Dukcapil dirumuskan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat dan menjalin kemitraan dengan beberapa CSR perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Krinjing, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi.

Desa binaan merupakan Suatu program pembangunan masyarakat dengan target lokasi sebuah desa yang memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah desa binaan. Program binaan merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk pemberdayaan dan pendampingan kelompok masyarakat.

Sasaran Desa Binaan Dispermades Dukcapil ini adalah daerah-daerah yang penduduknya kurang mampu, dipilihnya Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo karena daerah tersebut termasuk kategori dengan perekonomian menengah kebawah. Desa Krinjing merupakan salah satu Desa yang penulis pandang sukses dalam memanfaatkan program Desa Binaan. kesukses Desa Binaan di Desa Krinjing adalah terpenuhinya sarana dan prasarana Desa. sehubungan dengan hal tersebut maka program Desa Binaan penulis pandang dapat membantu masyarakat di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.

Berangkat dari kenyataan di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana hasil Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui hasil Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan sebagai masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) mengenai peningkatan

kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjadi seorang pemberdaya masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi banyak masyarakat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai referensi dan gambaran bagi peneliti dalam menyusun skripsi. Berdasarkan kajian yang telah ada, peneliti menemukan beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini diantaranya;

1. Skripsi Samsul Alil Bahril (2017) mahasiswa UIN ALAUDDIN Makassar, yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Goa”. Tujuan penelitian ini untuk menambah pengalaman dan wawasan juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang, dan menambah wawasan pemikiran mengenai pengaruh pemerintah terhadap kelompok usaha (KUBE) dalam peningkatan masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah memberikan layanan pendidikan non formal kepada masyarakat yang dibentuk untuk menjembatani masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui suatu kelompok. Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memasuki dunia kerja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berkaitan dengan Keahlian/ keterampilan namun perbedaan penelitian Samsul Alil Bahril dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian. Penelitian Samsul Alil Bahril subjeknya yaitu Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Goa sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Objek penelitian Samsul Alil Bahril pada pemberian layanan pendidikan non formal sedangkan penelitian penulis di penyediaan sarana dan prasarana.



2. Skripsi M. Yusuf Eko Sulisty (2018) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan dan mengetahui bagaimana PNPM Mandiri dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perkotaan menjalankan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. melalui proses pembangunan partisipatif kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek saja melainkan sebagai subjek untuk penanggulangan kemiskinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu program yang diberikan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan namun perbedaan penelitian M. Yusuf Eko Sulisty dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian M. Yusuf Eko Sulisty subjeknya yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan sedangkan penelitian penulis subjeknya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Objek penelitian M. Yusuf Eko Sulisty yaitu program pemerintah melalui PNPM mandiri sedangkan penelitian objek penulis yaitu program pemerintah Dispermades Dukcapil melalui desa binaan.

3. Skripsi Garnies Lellyana Sagita (2017) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Peran Badan Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus BUMDes Tirta Mandiri Klaten)”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan pariwisata. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Peran Badan Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014

Tentang Desa (Studi kasus BUMDes Tirta Mandiri Klaten) adalah sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat memberikan kesejahteraan berupa pengembangan potensi wisata alam (Umbul ponggok), kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan pengkreditan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu program yang diberikan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan namun perbedaan peneliti Garnies Lellyana Sagita subjeknya yaitu BUMDes Tirta Mandiridesa ponggok Kecamatan polanharjo Kabupaten Klaten Sedangkan subjek penelitian penulis yaitu Desa binaan desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Objek peneliti Garnies Lellyana Sagita kemampuan pengembang dalam mengelola Sumberdaya Alam sedangkan objek penelitian penulis yaitu Keahlian dalam mengintervensi desa.

4. Skripsi Hartini (2019) mahasiswa IAIN Parepare yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetanga Kab. Polman (Tinjauan ekonomi islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa batetanga Kab. Polman. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetanga Kab. Polman (Tinjauan ekonomi islam) memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, BUMDes didirikan antara lain untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Persamaan penelitian yang dilakukan Hartini dengan penulis Subjek penelitiannya yaitu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian Hartini dengan yang dilakukan penulis yaitu Fokus penelitian dan subjek penelitian. fokus penelitian Hartini yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sedangkan fokus penelitian penulis yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

5. Skripsi Ayu Purnami Wulandari (2014) Mahasiswa Universitas negeri yogyakarta yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kajongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan sapu gelagah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan peta permasalahan dan potensi yang ada di wilayah sekitar yang menjadi target sasaran pelatihan khususnya Desa Kajongan. Penyusunan pelaksanaan program pelatihan pembuatan Sapu Gelagah disesuaikan dengan melihat potensi dan keadaan masyarakat, serta masalah yang menjadi latar belakang berdirinya pelatihan pembuatan Sapu Gelagah.

Persamaan penelitian yang dilakukan Ayu Purnama Wulandari dengan penulis subjek penelitiannya yaitu pada peningkatan kesejahteraan. Perbedaan penelitian Ayu Purnama Wulandari dengan yang akan dilakukan penulis yaitu fokus dan subjek penelitian. Fokus penelitian Ayu Purnama Wulandari yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga sedangkan fokus penulis yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh solusi terhadap segala permasalahan. Didalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu (subagyo. 1991: 2).

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dimana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang ditemukan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan.

Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *vidiotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Moloeng. 2013: 11). Pengaplikasian metode kualitatif dilakukan dengan beberapa langkah. Diantaranya yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja (Danim. 2012: 51).

## 2. Definisi konseptual dan definisi operasional

Definisi konseptual merupakan konsepsi peneliti atas variabel-variabel atau aspek utama tema penelitian, yang disusun atau dibuat berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan. Definisi konseptual dibuat dengan tujuan untuk membatasi lingkup penelitian yang digunakan sebagai dasar pengumpulan data. Fungsi definisi konseptual adalah agar konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti dalam memahami variabel-variabel atau aspek-aspek utama tema penelitian menjadi jelas dan fokus.

Definisi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Friedlander (1980) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standart hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Menurut Arthur Dunham (1965). Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan (Rohiman. 2016: 37).

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) , kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan kesejahteraan sosial ini dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan

dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial (Rohiman. 2016: 38).

UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Fahrudin. 2014:10).

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu: 1). Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. 2). Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin. 2014: 8-10).

Adapun yang dimaksud dengan Desa Binaan atau juga sering disebut dengan istilah Desa Mitra Kerja merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang berusaha membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan (Dirjen pembinaan kelembagaan agamaislam. 2001: 2).

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Jawa Tengah di Desa Krijing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo adalah menggunakan metode pelaksanaan sebagai berikut:

#### A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan melakukan tiga hal; *Pertama*, Survei atau menentukan lokasi mitra untuk memperkuat kegiatan rill apa saja yang perlu dilakukan kedua mitra. *Kedua*, evaluasi permasalahan berupa penentuan solusi yang ditawarkan dengan kesepakatan bersama agar adanya persamaan persepsi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. *Tiga*, persiapan materi dan kelengkapanperalatan untuk melaksanakan kegiatan.

#### B. Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan diawali pendekatan dengan masyarakat, untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahap pendampingan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan aktivitas seluruh kegiatan.

### C. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan mulai dari awal, proses, hingga pencapaian hasil kegiatan.

3. Data adalah atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/ instrumen pengumpulan data. (Herdiayah. 2013: 9) Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (muhadjir. 2011: 100). Adapun teknik yang digunakan dalam menggali data primer adalah melalui observasi dan wawancara langsung kepada bidang II Dispermades Dukcapil, perangkat desa dan masyarakat.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama dan bukan asli) pemilik data atau informasi melainkan didapat dari pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Hikmat.2011: 83). Adapun dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber data yang bersumber dari dokumen, buku kegiatan Dispermasdes Dukcapil Jawa Tengah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi.

- a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal dalam upaya pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti menggali data sebanyak mungkin. Setelah itu, peneliti melakukan observasi dengan menyempitkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian (Sarwono. 2006: 224). Metode observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian (Margono. 2000: 37). Peneliti dalam hal ini berperan serta sebagai pengamat, sebagaimana menurut Lexy (2004: 186) bahwa peneliti dapat menjadi pemeran serta tetapi dapat melakukan fungsi pengamatan. Seseorang berpura-pura menjadi anggota tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna mendapatkan data terkait program apa saja melalui Desa Binaan, dan masyarakat sebagai objek penelitian.

b. Wawancara

Hampir pada semua penelitian kualitatif, wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data. Dimana wawancara merupakan percakapan antar dua orang yang salah satunya mempunyai tujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi (Soewandi. 2012: 152). Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan secara langsung oleh interviewer (pewawancara) kepada informan dengan bertahap-tahapan secara langsung untuk memperoleh informasi dengan cara mencatat jawaban ataupun merekamnya melalui alat perekam (Soeharto. 2004: 68). Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Puput selaku bidang dua Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan catatan sipil
- 2) Bapak Mulno selaku Kepala Desa
- 3) Bapak dukendro selaku sekretaris Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- 4) Ketua PKK
- 5) Ketua Karang Taruna
- 6) Warga mengikuti pelatihan pembuatan kopi arabika
- 7) Warga yang mengikuti pelatihan Sapu glagah

### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu, penelusuran dan perolehan data yang diperlakukan melalui data yang telah tersedia (Hikmat. 2011: 83). Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan menelusuri data yang telah tersedia. Adapun data tersebut bisa diperoleh dengan cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, foto dan lainnya (Soewandi. 2012: 160). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa buku kegiatan DISPERMASDES DUKCAPIL JAWA TENGAH, Album foto Kegiatan.

## 5. Uji keabsahan data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong. 2007: 320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang perlu dilakukan.

### a. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono. 2007: 273).

#### 1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:247).



## 2) Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007: 274).

## 3) Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007: 247).

## 6. Teknik analisis data

Analisi data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis model interaktif yang berlangsung terus menerus hingga tuntas. Adapun langkah-langkah menurut Miles dan Hiberman dalam (Sugiyono, 2015: 337) adalah:

### a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam hal ini penulis memindah hasil wawancara dan kemudian memisahkannya dari data yang tidak perlu digunakan. Sehingga data mentah yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta program desa binaan DISPERMADES DUKCAPIL JAWA TENGAH sebagai objek peneliti dapat tergali.

### b. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah kedua setelah mereduksi data. Pada tahapan ini data kembali dipilah dan di spesifikasikan hingga tersaji data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja sesuai dengan apa yang sudah dipahami. Pada tahapan ini penulis menyajikan data Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Di Desa Krijing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga, yang pada tahapan ini diharapkan menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Pada tahapan ini penulis menyimpulkan dari jawaban rumusan masalah terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui program Desa binaan dan Masyarakat sebagai subyek penelitian.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**  
**MELALUI PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI**  
**JAWA TENGAH DI DESA KRINJING KECAMATAN WATUMALANG**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**A. Kesejahteraan Masyarakat**

**1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Pengertian Kesejahteraan masyarakat dalam buku pengantar kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai berikut. Secara harfiah, kesejahteraan sosial mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwodarminto, kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Adapun sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan Pengertian sosial, menurut Dr. J.A. Poentioen, mengandung makna sebagai berikut Sosial diartikan sebagai suatu indikasi dari kehidupan bersama makhluk manusia, misalnya dalam kebersamaan rasa, berpikir, bertindak, dan dalam hubungan antar manusia (Rohiman. 2016: 36).

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan berasal dari kata “ sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman dan kerjasama. Orang yang sosial adalah orang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungan secara baik (Fahrudin. 2014: 8).

Friedlander (1980) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standart hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa: Pertama konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “*Organized system*” yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Kedua, tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Ketiga, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara, meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya, maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standart kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga maupun kebutuhan masyarakat terpenuhi (Fahrudin. 2014: 9).

Menurut Arthur Dunham (1965). Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan (Rohiman. 2016: 37).

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) , kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan kesejahteraan sosial ini dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial (Rohiman. 2016: 38).

UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Fahrudin. 2014:10).

## **2. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin. 2014: 8-10).

Schneiderman (1972) dalam Menurut Fahrudin (2012:10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system, dan perubahan system.

### **a. Pemeliharaan Sistem**

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

### **b. Pengawasan Sistem**

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan

menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menysihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggotamasyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

**B. Fungsi-fungsi Kesejahteraan sosial**

Fungsi kesejahteraan sosisal bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada bagian-bagian untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

### 3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan atau sumberdaya sosial dalam masyarakat.

### 4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin. 2014: 12).

Melihat kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

## **C. Usaha Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial**

Usaha kesejahteraan sosial atau *social welfare service* pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial atau social service. Cassidy seperti dikutip oleh Friedlander (1980) mengatakan “sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia (Fahrudin. 2014: 15).

Dalam UU No. 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “Usaha Kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membinam memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah , terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Fahrudin. 2014: 16).

Dalam usaha kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial memegang peranan sentral yaitu sebagai “*meta-institution*” (Siporin,1975). Hal ini berarti bahwa dalam usaha kesejahteraan sosial , baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, maka profesi pekerjaan sosial merupakan profesi utama didalamnya (Fahrudin. 2014: 16).

Kesejahteraan yang dimulai dengan Islam, adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Sebab tidak mungkin jiwa akan merasakan ketenangan apabila kepribadian terpecah. Sebagai contoh nyata, kesejahteraan sosial dimulai dari kesadaran bahwa apapun keputusan Allah, setelah usaha maksimal, adalah yang terbaik dan akan selalu mengandung hikmah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepada-Nya.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ ۲۲ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ ۲۳

Artinya: *Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 23 (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri(QS. Al-hadid. 57: 22-23).*

Dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga , dan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang serasi diantara semua anggota masyarakat. Salah satu indikator dari keserasian tersebut, adalah kesediaan mengulurkan tangan sebelum diminta oleh yang membutuhkan, atau kesediaan berkorban demi kepentingan orang banyak (Rohiman. 2016: 48).



#### **D. Nilai dan prinsip dalam praktik bidang kesejahteraan sosial**

Dalam mengembangkan berbagai layanan sosial (*social services*) pada masyarakat, Zastrow (2010) melihat ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan profesi di bidang kesejahteraan sosial diantaranya:

##### 1. Pengetahuan (*knowledge*)

menurut pendapat Kahn (1969) pengetahuan adalah pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan (*science*); belajar; dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan keterampilan. Sedangkan Allen Pincus dan Anne Minahan dalam Zastrow (2010: 97) melihat pengetahuan sebagai pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses observasi secara ilmiah, sehingga hasilnya telah diverifikasi terlebih dahulu, serta diverifikasi oleh mereka yang ingin menguji keabsahan dari hasil observasi tersebut (Rukminto. 2013: 77) .

##### 2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan, serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Secara definitif, keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan, keahlian ataupun kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan. Di sini, keterampilan tidak muncul sekedar dari suatu proses uji-coba berkala, tetapi keterampilan muncul karena adanya keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari oleh seorang agen perubahan. Semakin malas seseorang mempelajari berbagai pengetahuan terkait dengan praktik sehari-hari yang ia hadapi, maka semakin miskin variasi alternatif penanganan masalah yang bisa ia berikan. Sehingga dapat dikatakan Keterampilan itu muncul sebagai aspek terapan dari pengetahuan yang ia miliki.

##### 3. Nilai (*Value*)

Nilai dalam kamus KBBI memiliki arti harga, sifat-sifat, etika, sedangkan menurut Lorens Bagus (2002) dalam bukunya “kamus filsafat” menjelaskan tentang nilai sebagai berikut:

- a. Nilai dalam bahasa inggris *value*, dan dalam bahasa latin *valere* yang berarti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat.
- b. Nilai ditinjau dari harkat adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.
- c. Nilai ditinjau dari segi keistimewaan adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan.

Nilai merupakan suatu yang keberadaanya nyata, tetapi ia bersembunyi dibalik yang nampak, tidak tergantung kepada kenyataan-kenyataan lain, dan tidak pernah mengalami perubahan (meskipun pembawa nilai bisa berubah). Ada tiga bentuk nilai menurut (Soyomukti, 2011: 210) yakni,

- b. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas (norma-norma), prinsip-prinsip moral, dan teori-teori moral Etika merupakan cabang aksiologi yang membahas baik dan buruk. Etika dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok manusia yang mengatur tingkah lakunya.
- c. Moralitas adalah masalah nilai yang memandu keputusan dan tindakan. moralitas umumnya dipengaruhi budaya, masyarakat, dan agama.
- d. Estetika adalah pengetahuan tentang sesuatu yang indah (mengandung keindahan). Jadi, objeknya adalah hal yang dianggap indah dan hal yang dianggap tidak indah atau jelek. Ia membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Estetika adalah cabang ilmu filsafat yang memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, rasa, atau selera (taste). Kreasi dan apresiasi tentang keindahan.

Pincus dan minahan (1973: 38) menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Pincus dan Minahan dalam Zastrow (2010) melihat nilai bukan sebagai sesuatu yang kita lihat dari dunia kita berdasarkan apa yang kita ketehai, akan tetapi nilai lebih terkait

dengan apa yang seharusnya terjadi. Misalnya, “keyakinan bahwa suatu masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu individu mengembangkan potensi diri mereka (setiap individu)”. Maka pernyataan tersebut lebih berupa pernyataan tentang nilai dan bukan pernyataan tentang pengetahuan (Rukminto. 2013: 81).

Nilai-nilai dasar dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial sendiri pada awalnya banyak dipengaruhi oleh nilai yang berkembang pada ‘profesi yang memberikan bantuan kepada masyarakat’ lainnya. Beberapa nilai tersebut antara lain:

- a. Agen perubahan (*agent of change*) dalam hal ini agen perubahan harus mempertimbangkan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan memerhatikan hak anggota masyarakat lain.
- b. Agen perubahan harus mempertimbangkan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan dalam memenuhi hak-hak dan kebebasan asasinya yang sejalan dengan kepentingan bersama (tidak bertentangan dengan norma masyarakat secara umum).
- c. Perubahan sosial terencana yang dilakukan oleh agen perubahan harus memerhatikan unsur keterlibatan dan keikutsertaan (partisipasi) warga masyarakat sebagai hak dan juga kewajiban masyarakat.
- d. Perubahan sosial terencana (intervensi sosial) yang dikembangkan oleh agen perubahan haruslah melihat dan memerhatikan unsur kesinambungan dari program tersebut.
- e. Perubahan sosial terencana (intervensi sosial) yang dikembangkan oleh agen perubahan haruslah memerhatikan dan mempertimbangkan unsur integrasi sosial dalam masyarakat.
- f. Agen perubahan haruslah memerhatikan hak *beneficiaries* ataupun komunitas sasaran dalam mengembangkan layanan ataupun program, sehingga tidak terjadi hubungan yang eksploitatif di antara mereka (Rukminto. 2013: 82).

## **E. Desa Binaan**

## **1. Pengertian Desa Binaan**

Desa Binaan adalah desa-desa yang pada umumnya tergolong desa dalam kategori tertinggal, terbelakang, atau miskin. Desa-desa itu pada umumnya merupakan desa penerima program.

Seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Desa Binaan atau juga sering disebut dengan istilah Desa Mitra Kerja merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang berusaha membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan (Dirjen pembinaan kelembagaan agama Islam. 2001: 2).

## **2. Tahapan Pelaksanaan Desa Binaan**

Program Desa Binaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam buku “pengembangan masyarakat” karya Zubedi ada enam tahapan diantaranya:

### 1) Tahap pemaparan masalah

Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengelompokkan dan menentukan masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapi warga. Warga masyarakat umumnya menyadari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

### 2) Tahap analisis masalah

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

### 3) Tahap penentuan tujuan dan sasaran

Tujuan merujuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum. Sedangkan sasaran bersifat lebih khusus dibandingkan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran tidak dirumuskan sekali untuk selamanya, melainkan tujuan dan sasaran sering diperbarui.

4) Tahap perencanaan tindakan

Tahap ini dilakukan dengan merencanakan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, dan faktor-faktor pendukung.

5) Tahap pelaksana kegiatan

Tahap ini dilakukan dengan mengimplementasikan tahapan-tahapan yang telah direncanakan.

6) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan secara terus menerus, baik secara formal maupun secara nonformal atau semi formal. Dalam melakukan tahapan evaluasi dapat dilakukan secara berkala, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program Desa Binaan DISPERMADES DUKCAPIL Jawa Tengah di Desa Krijing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo adalah menggunakan metode pelaksanaan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan melakukan tiga hal; *Pertama*, Survei atau menentukan lokasi mitra untuk memperkuat kegiatan rill apa saja yang perlu dilakukan kedua mitra. *Kedua*, evaluasi permasalahan berupa penentuan solusi yang ditawarkan dengan kesepakatan bersama agar adanya persamaan persepsi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. *Tiga*, persiapan materi dan kelengkapanperalatan untuk melaksanakan kegiatan.

## 2) Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan diawali pendekatan dengan masyarakat, untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahap pendampingan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan aktivitas seluruh kegiatan.

## 3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan mulai dari awal, proses, hingga pencapaian hasil kegiatan.

### **3. TujuanDesaBinaan**

Tujuan umum Desa binaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bisa membangun desa mereka secara swadaya dan dapat merealisasikan cita-cita, keinginan, dan kebutuhan mereka di dalam pembangunan desa mereka sendiri. Sedangkan tujuan operasionalnya adalah membantu mengembangkan sumber mata pencaharian masyarakat melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan serta meningkatkan kadar swadaya masyarakat sebagai landasan yang kuat untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang lebih baik (Dirjen pembinaan kelembagaan agamaislam. 2001: 3).

## **BAB III**

# **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA KRINJING KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO**

## **A. Letak dan Kondisi Geografis**

Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Krinjing, pengangguran merupakan sebuah keadaan yang menggambarkan lemahnya keberdayaan masyarakat. Menurut data Pemerintahan Jawa Tengah Dispermades Dukcapil angka kemiskinan yang terdapat di Desa Krinjing sebanyak 777 kk miskin setelah di verifikasi dan pengecekan ke lapangan berkurang sekitar 193 kk antara lain karena sudah mampu, meninggal dan pindah, namun demikian ada 57 kk miskin yang selama ini tidak masuk data miskin.

Desa Krinjing merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Watumalang, kabupaten Wonosobo, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 8,5 KM dari ibu kota kecamatan atau 14 KM dari ibu kota kabupaten Wonosobo.. Desa Krinjing memiliki luas wilayah 472,1716 Ha dan berada pada ketinggian 1.214 meter diatas permukaan laut (MDPL), Desa Krinjing merupakan dataran tinggi yang memiliki curah hujan 8 bulan. Desa Krinjing terletak berada di kaki Gunung Bisma sehingga menjadikan desa yang kaya akan sumber daya alamnya mulai dari hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas hasil alam lainnya di desa Krinjing. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berikut peta administratif Desa Krinjing:

Gambar. 1

Peta Desa Krinjing



*Sumber: Google Earth 2020 (diambil pada 09/05/ pukul 06.22)*

Adapun secara Administratif Desa Krinjing berbatasan langsung dengan beberapa desa yaitu:

- a. Sebelah Utara Desa Gunung Bismo
- b. Sebelah Selatan Desa Wonokampir
- c. Sebelah Timur Desa Deroduwur
- d. Sebelah Barat Desa Mutisari

Sebagai desa yang beradi di bawah lereng Gunung Bismo selain kekayaan alamnya yang melimpah, Desa Krinjing juga memiliki jumlah penduduk yang terbilang banyak yaitu 4.793 jiwa yang terdiri dari 2.549 jiwa laki-laki dan 2.244 jiwa perempuan, mayoritas penduduk beragama islam, suasana gotongroyong di Desa Krinjing masih sangat kental.

Pada umumnya penduduk Desa Krinjing bermata pencarian sebagai petani, buruh dan selebihnya menjadi guru, pedagang, dan PNS. Selain itu Desa Krinjing didkung oleh sarana dan potensi alam yang memadai. Fasilitas jalan menuju Desa Krinjing semua dapat dilalui menggunakan kendaraan dan beraspal. Ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan bahan baku dan keadaan wilayah yang dimiliki sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komposisi penduduk juga dapat dilihat dari aspek pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel. 1

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Krinjing

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	2.183
2	SLTP/MTS	212
3	SLTA/MA	74
4	AKADEMI	6
5	SARJANA	7
6	<b>JUMLAH</b>	2.482

*Sumber data: Demografi desa Krinjing 2019*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Krinjing masih rendah. Terbukti dengan jumlah terbesar ditempati oleh masyarakat yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat terlihat dari warga yang berpendidikan Sekolah Dasar mencapai 2.183, SLTP 212, SLTA 74, AKADEMI 6, dan hanya 7 yang menempuh S1.



Tingkat pendidikan masyarakat Desa Krinjing juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan, berikut sarana dan prasarana di Desa Krinjing:

Tabel. 2

Sarana dan Prasarana pendidikan di Desa Krinjing

No	Sarana pendidikan	Pemerintah	Swasta	Desa	Jumlah
1	Play Group	-	1	1	2
2	TK/RA	-	-	1	1
3	SD/MI	2	1	-	3
4	SMP/MTS	-	3	-	3
5	SMA/MA	-	-	-	0
6	Pendidikan non formal	-	3	-	6

*Sumber data Demografi Desa Krinjing 2019*

Dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh jumlah sarana pendidikan di Desa Krinjing berjumlah 15. Dan terdiri dari 2 Play Group, 1 TK/RA, 3 SD/MI, 3 SMP/MI, 6 pendidikan non formal.

Komposisi penduduk juga dapat dilihat dari aspek jenis pekerjaan. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan:

Tabel. 3

Jumlah penduduk berdasarkan Jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tukang Kayu	18 orang	0 orang
2	Tukang Batu	14 orang	0 orang
3	Tukang Cuci	0	11 orang
4	Tukang Jahit	8 orang	3 orang
5	Karyawan Honorer	23 orang	17 orang
6	Tukang Gigi	2 orang	0 orang
7	Pemuka Agama	12 orang	0 orang
8	Buruh Migran	98 orang	65 orang
9	Jumlah total	271 orang	
10	Petani	1.494 keluarga	

*Sumber data Demografi Desa Krinjing 2019.*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Desa Krinjing memiliki mata pencaharian buruh tani sebanyak 1.494 keluarga, 163 orang sebagai buruh

migran, 40 orang sebagai karyawan honorer, 18 orang sebagai tukang kayu, 14 orang sebagai tukang batu, 12 orang sebagai pemuka agama, 11 orang sebagai tukang cuci, 11 orang sebagai tukang jahit, 2 orang sebagai tukang gigi.

## **B. Profil Dispermades Dukcapil Profinsi Jawa Tengah**

### **1. Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah ada sejak tahun 2017, yang ber alamat di Dispermadesdukcapil Prov. Jateng Jl. Menteri Supeno No. 17, Semarang. Dalam sejarahnya lembaga ini telah mengalami beberapa pergantian nama diantaranya :

- a. Kantor Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Daerah (tahun 1966)
- b. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (tahun 1970-an)
- c. Direktorat Pembangunan Desa (tahun 1980-an)
- d. Badan Pembangunan Masyarakat Desa (tahun 1990-an)
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat (mulai tahun 2001)
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (mulai tahun 2017).

“Pelaksanaan program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dimulai pada bulan Maret 2019, setelah Dispermades Dukcapil menerima data dan survey lapangan secara langsung di Desa Krinjing. Program-program yang dijalankan Dispermades Dukcapil tidak lepas dari bantuan-bantuan beberapa CSR perusahaan yang memberikan bantuan bertujuan untuk mempercepat melaksanakan program Desa Binaan. Dalam hal ini setiap bidang Dispermades Dukcapil mengampu satu Desa yang di kategorikan Desa miskin. Untuk itu peneliti akan memaparkan program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah yang melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo”. (Hasil wawancara, Puput, selaku Bidang II Dispermades Dukcapil pada tanggal 16/12/2019/10.00).

Pelaksanaan program Desa Binaan merupakan Program yang diberikan Pemerintah Jawa tengah setiap lima tahunan guna mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Program Desa Binaan ini Dispermades Dukcapil menjalin kemitraan dengan pihak lain (CSR) dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

## **2. Visi dan Misi Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) berlokasi di Jalan Menteri Supeno No. 17 Semarang. Dalam menghadapi dinamika yang berkembang di masyarakat, menuntut birokrasi yang bisa memberikan pelayanan optimal maka disusunlah visi, misi dan strategi sebagai jawaban terhadap tuntutan perubahan yang dihadapi. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) adalah sebagai berikut :

### **a. Visi**

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

### **b. Misi**

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
- 4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- 5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- 7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## **3. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah**

a. Tujuan yang akan dicapai dalam jangka pendek untuk mewujudkan visi dan misi adalah :

- 1) Mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya kemampuan (*empowered*) dan berdaya saing (kompetitif) yang mengarah kepada kemandirian melalui fasilitas oleh pemerintah dan peran aktif masyarakat itu sendiri.

- 2) Memanfaatkan secara optimal sumber daya alam desa/kelurahan yang ada dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif badan usaha milik masyarakat desa/kelurahan dan lembaga keuangan mikro.
- 4) Meningkatkan kemampuan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yang diarahkan pada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat desa/kelurahan.

b. Sasaran pembangunan masyarakat desa :

- 1) Meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan.
- 2) Memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat.
- 3) Berkembangnya dan meningkatnya pemanfaatan TTG.
- 4) Terwujudnya proaktif masyarakat desa/kelurahan tanggap dalam memanfaatkan peluang yang ada.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah desa/kelurahan melalui pelatihan.
- 6) Terciptanya persamaan persepsi tentang mekanisme penahapan pemberdayaan masyarakat.
- 7) Berkembangnya UMKM melalui akses modal, pasar dan ketersediaan prasarana transportasi.
- 8) Berkembangnya pasar tradisional/ pasar desa dan lembaga usaha ekonomi masyarakat.
- 9) Meningkatnya partisipasi/peran serta masyarakat dalam proses penahapan pembangunan.
- 10) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam.
- 11) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 12) Terwujudnya kualitas pembangunan masyarakat desa/kelurahan dan meningkatnya kualitas pembangunan yang dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

#### **4. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah**

##### **a. Kedudukan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekda.

##### **b. Tugas Pokok**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

##### **c. Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) mempunyai tugas pokok sebagai berikut di atas. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

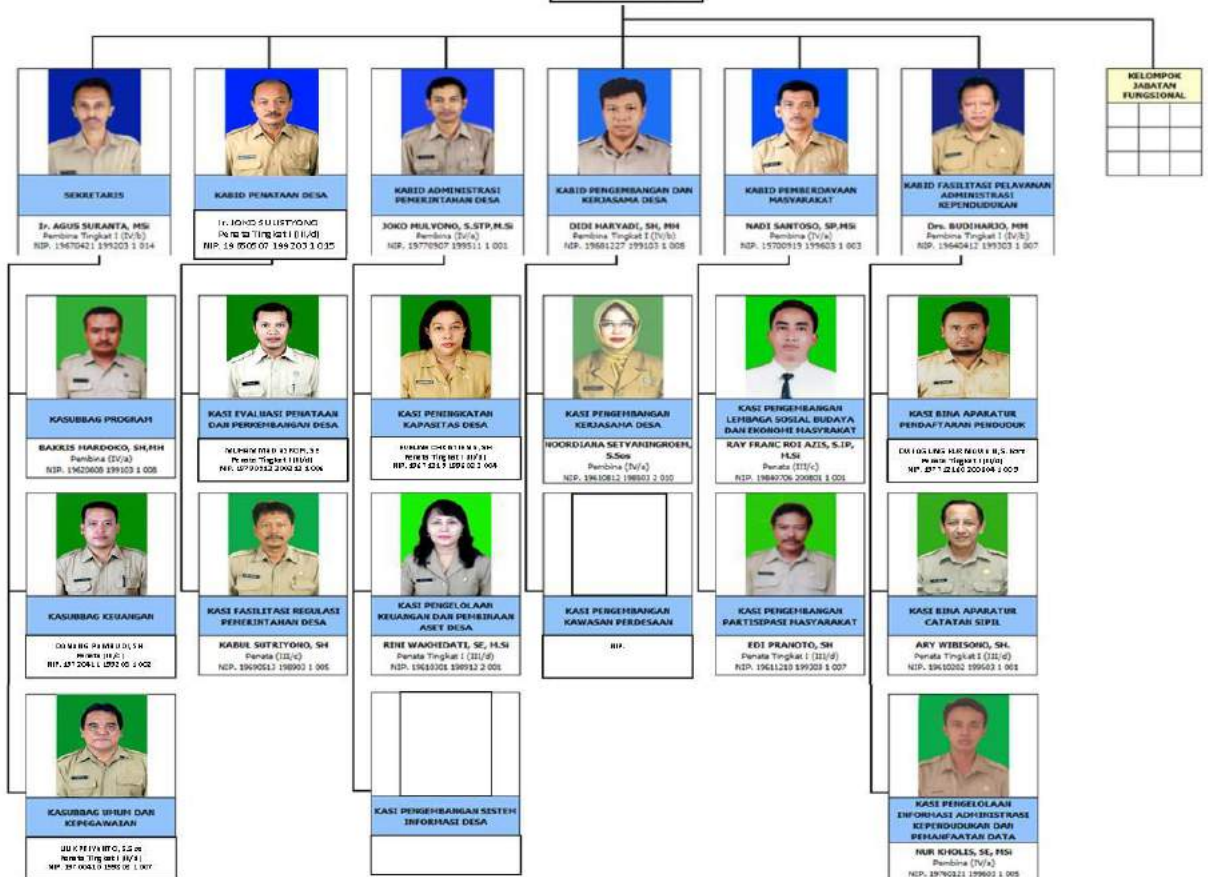
#### **5. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah**

Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah juga memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Penataan Desa
- d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
- e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

Date per Tanggal 03.08.2017



Sumber data: [www.Dispermadesdukcapil.co.id](http://www.Dispermadesdukcapil.co.id) (Diakses pada 09/03/2020 pada pukul 08.22)

### **C. Pelaksanaan Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.**

Friedlander (1980) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standart hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa: Pertama konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau "*Organized system*" yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Kedua, tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Ketiga, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara, meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya, maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standart kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga maupun kebutuhan masyarakat terpenuhi (Adi fahrudin. 2014: 9).

UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Adi fahrudin. 2014:10).

Dispermades Dukcapil dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga mengimplementasikan fungsi-fungsi Kesejahteraan sosial di dalamnya, fungsi-fungsi tersebut antara lain:

Upaya pelaksanaan peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah bukanlah upaya yang mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui. Seperti memberikan penyadaran kepada masyarakat, menumbuhkan keberanian dan minat kepada masyarakat, oleh karena itu berikut proses program Desa Binaan yang dilakukan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah:



## 1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan Dispermades dalam melaksanakan program Desa Binaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing. Strategi intervensi dalam penanggulangan kemiskinan dalam rangka satu OPD satu Desa dampingan menuju desa sejahtera yaitu:

### a. Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan

Untuk melakukan penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan langkah yang dilakukan Dispermades Dukcapil yaitu, menggali potensi Desa dan menentukan Program penanggulangan kemiskinan yang sudah masuk diwilayah desa, mengintervensi karakter kemiskinan masyarakat desa, menentukan peta, potensi dan permasalahan kemiskinan, menentukan arah penanggulangan kemiskinan, pola intervensi penanggulangan kemiskinan, dan indikator capaian penanggulangan kemiskinan.

### b. Mendorong dan memfasilitasi untuk warga miskin untuk dapat memanfaatkan perlindungan sosial dengan baik.

### c. Melakukan program pendampingan kepada masyarakat pada warga miskin melalui, peningkatan kapasitas dan keterampilan, memberikan bantuan atau akses modal usaha, pelatihan manajemen usaha, pembangunan sarana prasarana yang berhubungan dengan indikator kemiskinan, dan peningkatan kapasitas untuk perubahan sikap dan perilaku.

### d. Melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan yang ada, baik kondisi perumahan, sosial ekonomi, keterlibatan dalam program perlindungan sosial dan kepemilikan asset.

### e. Menjalin kemitraan dengan pihak lain (CSR) dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Gambar. 2

Intervensi Dispermades Dukcapil di Desa Krinjing



*Sumber: Buku agenda Dispermades Dukcapil*

2. Tahap pelaksanaan dan pendampingan

Setelah melakukan intervensi dan pendataan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dan pendampingan. Tahap ini terdiri dari memberikan pelatihan, memberikan pendampingan, dan pembinaan dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Krinjing. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan merupakan proses penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan mandiri sehingga membutuhkan kapasitas diri. pelatihan dalam membuat kerajinan merupakan salah satu alternatif pemberdayaan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat Desa Krinjing yang di dampingi oleh pemerintah. pemilihan pelatihan pembuatan kerajinan disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Dispermades Dukcapil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di Desa Krinjing.

Dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing oleh Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah hal yang dilakukan adalah melakukan tahap pelaksanaan dan pendampingan. Untuk melaksanakan pendampingan Dispermades Memberikan pembekalan, serta memberikan bantuan secara langsung. Dalam hal ini bidang II Dispermades Dukcapil dalam Pemberian sarana dan prasarana sesuai tupoksi Dispermades Dukcapil tersebut diantara lainnya:

- Pembentukan Satgas Desa Adat (Sosialisasi dan pendampingan)
- Fasilitas Regulasi Desa (Sosialisasi dan Fasilitas Produk Hukum Desa)

- Fasilitas Penyusunan Profil Desa (Bimtek dan Fasilitas)
- Evaluasi Diri Desa ( Evaluasi Perkembangan Desa per tahun)
- Pemberian Bantuan Operasional KPMD ( Kader Pengembangan Masyarakat Desa Bimtek dan Penyaluran)
- Pemberian Bantuan Ketahanan Masyarakat Desa (Bimtek dan Penyaluran)
- Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa (Bimtek dan penyaluran)
- Fasilitasi Sistem Informasi Desa (Bimtek dan Pendampingan)
- Pelatihan BPD
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Bimtek dan Pendampingan RPJM Desa, RKP Desa, APBD Desa)
- Fasilitasi Sistem Keuangan Desa (Bimtek dan Pendampingan)
- Fasilitasi Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa dan Tanah Kas Desa (Pelatihan dan Pendampingan)
- Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk Rintisan Desa berdikari menjadi kawasan Perdesaan (Bimtek dan Penyertaan Modal)
- Fasilitasi Pembentukan Bumdes Bersama (Bimtek, Pendampingan, dan Penguatan)
- Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (Bimtek dan Pendampingan)
- Fasilitas Pembentukan dan Pelatihan Bumdes (Bimtek dan Pendampingan)
- Fasilitas Pasar Desa (Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana)
- Pelatihan Dan Penguatan Kapasitas KPMD (Bimtek)
- Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan TTG
- Fasilitas Dokumen administrasi Kependudukan (Sosialisasi dan perekaman e-KTP).

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil provinsi Jawa Tengah:

“Guna menyusun program peningkatan kapasitas kesejahteraan masyarakat, perlu diketahui peta permasalahan dan potensi yang ada di wilayah sekitar yang menjadi target sasaran pembekalan dan bantuan khususnya Desa Krinjing. Penyusunan pelaksanaan program pembekalan dan pemberian bantuan tersebut disesuaikan dengan melihat potensi dan melihat keadaan masyarakat, serta permasalahan yang menjadi latar belakang adanya program Desa Binaan di Desa Krinjing diantaranya: Pengangguran yang semakin bertambah, lapangan pekerjaan yang semakin berkurang, tingkat pendidikan

yang rendah, sehingga menjadikan desa krinjing masuk kriteria Desa miskin” (Hasil wawancara, Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/09.10).

### 3. Tahap Evaluasi

Tahapan selanjutnya yaitu tahap evaluasi, proses evaluasi atau penilaian pada suatu pelaksanaan kegiatan terkadang tidak diperhatikan, padahal evaluasi sangatlah penting kaitanya dengan sebuah kegiatan. Evaluasi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membelajarkan dan menilai sejauhmana pelaksanaan dilakukan, apakah sudah efektif, mengalami kemunduran, atau kenaikan pada pelaksanaan suatu kegiatan. Seperti halnya yang disampaikan Bapak puput Selaku Bidang II Dispermades Dukcapil:

“Tujuan adanya program Desa Binaan ini untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak bingung mencari pekerjaan, menganggur, serta meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Krinjing agar lebih berdaya dan sejahtera”. (Hasil wawancara dengan bapak Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/09.55).

Sementara itu Bapak Mulno selaku Kepala Desa Krinjing juga menyampaikan:

“Saya selaku Kepala Desa akan selalu memantau perkembangan kegiatan yang sudah berjalan ini, apakah sudah sesuai dengan harapan, atau justru mengalami penurunan. Yang diharapkan semua bisa berjalan dengan lancar, kondisi ekonomi masyarakat bisa meningkat, dan Desa Krinjing ini bisa lebih maju”. (Hasil wawancara dengan Bapak Mulno selaku kepala desa Krinjing, 28/04/2020/10.38)

## **D. Hasil Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo**

Adapun yang dimaksud dengan Desa Binaan atau juga sering disebut dengan istilah Desa Mitra Kerja merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang berusaha membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan. Program Desa binaan yang diberikan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah salah satunya di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dilatar belakangi oleh permasalahan masih banyaknya angka kemiskinan yang ada di Desa Krinjing. Adapun tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang, perumahan,

pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Berikut hasil program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

## 1. Ekonomi

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi dengan masyarakat sebagai pelakunya, mengelola sumberdaya apapun secara swadaya, guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarga (Herawati, 2014: 17). Upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dengan cara mendorong, memotivasi, dan menggali sumberdaya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga kesejahteraan hidup dapat dicapai.

Keadaan ekonomi masyarakat yang melemah menjadikan masyarakat desa Krinjing termasuk kategori zona merah atau Desa Miskin, hal tersebut disebabkan banyaknya pengangguran, kurangnya keterampilan mengolah potensi diri dan potensi alamnya, Maka dari itu Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah memberikan Program Desa Binaan guna mengurangi angka kemiskinan dari segi ekonomi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil.

“Dalam hal ini kami memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna dalam pemanfaatan sumberdaya alam, pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai, seperti halnya, membuat kerajinan sapu glagah, membatik, dan bagaimana pengolahan kopi arabika. dari kegiatan tersebut nantinya diharapkan masyarakat bisa lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan nilai ekonomis, sedangkan dari kegiatan membatik, rencananya hasil batik dari Desa Krinjing akan dijadikan batik khas lokal sehingga bisa produksi dalam skala banyak. Untuk mengolah hasil perkebunan kopi pemuda sudah mahir dalam menjalankan bagaimana pengolahan kopi arabika sehingga nantinya produk kopi setempat bisa menembus pasaran yang lebih luas”(Hasil wawancara, Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/09.55).

Berikut hasil program Desa Binaan Dispermades Dukcapil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat:

a. Hasil Kerajinan Limbah Glagah

Gambar. 3

Pendampingan Dispermades Dukcapil pembuatan kerajinan Glagah



*Sumber: Buku agenda Dispermades Dukcapil*

Masyarakat desa Krinjing telah berhasil membuat kerajinan limbah Glagah dengan menghasilkan produk berupa Souvenir gantungan kunci dan aksesoris bolpoin pensil, dan sapu glagah. Hal ini merupakan hasil pendampingan output dari Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah pada desa binaan, seperti halnya yang disampaikan Mas Warmono selaku koordinator pengajaran limbah glagah ia menyampaikan bahwa:

“Awal mula berdirinya pelatihan sapu glagah yaitu karena adanya potensi bahan baku yaitu tanaman glagah di hutan, tujuan berdirinya sapu glagah yaitu untuk meningkatkan sumberdaya manusia di Desa Krinjing, dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa krinjing. Dalam pelaksanaan pelatihan sapu glagah saya lebih mengutamakan pesertanya dari ibu-ibu yang masih menganggur, sehingga diharapkan bisa membantu perekonomian keluarga. Dalam kurun waktu dari diadakannya pelatihan sampai sekarang kita sudah memproduksi sapu glagah kurang lebih ada dua belas ribu mas. Untuk harapan kedepan semoga dengan adanya kegiatan pembuatan sapu glagah ini masyarakat di desa krinjing mulai meningkat dari segi ekonomi, sehingga masyarakat lebih sejahtera” (Hasil wawancara dengan mas Warmono selaku koordinator pembuat sapu glagah, 05/05/2020/12.06).

selain itu mbak Puji juga menyampaikan hal yang serupa, setelah mengikuti pelatihan kerajinan sapu glagah:

“Alhamdulillah mas dengan adanya pelatihan pembuatan kerajinan sapu glgah ini sangat bermanfaat bagi kami, banyaknya potensi alam dan kemampuan masyarakat yang mahir untuk membuatnya. Melihat keadaan

masyarakat kurang mampu serta tingkat pengangguran yang masih banyak, masalah bahan baku itu banyak dan mudah dicari mas. Pembuatan sapu glagah juga relatif mudah, dengan sedikit keterampilan saja masyarakat sudah bisa membuat sebuah sapu yang kita tahu manfaatnya. Sapu ini juga diminati oleh masyarakat luar daerah, terkadang ada pesanan mas untuk membuat puluhan sampai ratusan sapu glagah ini. Dengan adanya kegiatan ini bisa menambah penghasilan dan bisa membuat masyarakat lebih sejahtera mas” (Hasil wawancara dengan mbak puji salah satu warga yang mengikuti kerajinan sapu glagah, 05/05/2020/08.12).

b. Kerajinan Sapu Lidi

Untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat desa Krinjing, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan pemberdayaan melalui kerajinan produk Sapu Lidi. Hasil dari produk ini dipasarkan di luar wilayah Wonosobo. Dalam 1 hari mampu produksi 5 sapu lidi perorang.

c. Hasil Kerajinan Bunga Plastik dari limbah kantong plastik

Gambar. 4

Pendampingan Dispermades Dukcapil pembuatan kerajinan bunga plastik



*Sumber: Buku agenda Dispermades Dukcapil*

Ibu-ibu PKK desa Krinjing yang dipimpin Ibu Kepala Desa Krinjing, telah memanfaatkan limbah plastik untuk menjadi rangkaian bunga plastik yang menarik. Kegiatan ini tidak lepas dari pendampingan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya yang disampaikan Ibu Rumiastusi selaku ketua PKK Desa Krinjing, ia menyampaikan bahwa:

“pertama kali diadakanya kegiatan pembuatan kerajinan bunga plastik yaitu dengan perencanaan kemudian kami mengadakan sosialisasi tentang



bahnya sampah plastik yang ada dilingkungan kita, selanjutnya kita upayakan bagaimana caranya supaya sampah tersebut tidak mengganggu lingkungan kita. Tujuannya limbah plastik tidak terlalu banyak dan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Krinjing”. (Hasil wawancara dengan Ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, 06/05/2020/13.22)

d. Hasil Pelatihan Membatik

Gambar. 5

Pendampingan Dispermades Dukcapil pelatihan membatik



*Sumber: Buku agenda Dispermades Dukcapil*

Dalam pelaksanaan pembinaan desa binaan, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah menggandeng akademisi dalam hal ini Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) untuk memberikan pelatihan membatik bagi para warga khususnya ibu-ibu PKK desa Krinjing meski saat ini masih dalam tahap proses pembelajaran namun telah mampu menghasilkan produk batik khas Desa Krinjing. Sama Seperti halnya yang disampaikan Ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, ia menyampaikan bahwa:

“Dalam mengadakan pelatihan membatik langkah pertama yang dilakukan yaitu perencanaan terlebih dahulu mas, kemudian kami melihat ibu-ibu banyak yang mempunyai waktu luang, lalu kami berusaha untuk memberikan kegiatan para ibu-ibu karena tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih”. (Hasil wawancara dengan Ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, 06/05/2020/13.22)



e. Hasil Olahan Kopi Arabika Desa Krinjing

Gambar. 6

Pendampingan Dispermades Dukcapil olahan kopi arabika



*Sumber: Buku agenda Dispermades Dukcapil*

Karang Taruna desa Krinjing telah berkiprah untuk memajukan Desa Krinjing berupa pengolahan kopi Arabika khas Desa Krinjing. Melalui pendampingan pemberdayaan dari Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, para pemuda Karang Taruna berhasil membuat olahan kopi yang hasil dari panen kopi di wilayah desa Krinjing untuk dijadikan minuman kopi. Produk olahan Kopi Arabika Desa Krinjing ini telah bekerjasama dengan BUMDes Mekar Sari, sebagaimana yang disampaikan mas Untung selaku ketua Karang Taruna Desa Krinjing:

“banyaknya komoditas petani yang menanam kopi membuat saya dan teman-teman untuk bergerak mengolahnya menjadi hasil olahan kopi arabika, karena sebelumnya belum ada warga disini yang bisa mengolahnya dan biasanya dijual langsung dengan harga yang murah. karena dengan pengolahan kopi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan membawa nama Desa Krinjing lewat kopi” (Hasil wawancara dengan mas Untung selaku ketua Karang Taruna Desa Krinjing, 27/04/2020/09.40).

f. Hasil Kerajinan Plastik Bekas Minuman Gelas

Gambar. 7

Pendampingan Dispermades Dukcapil kerajinan plastik bekas



*Sumber: Buku agenda Dispermades Dukcapil*

Untuk meningkatkan produktivitas ibu-ibu warga desa Krinjing, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah memberikan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pemanfaatan limbah sampah plastik bekas minuman kemasan gelas untuk dibuat tas, tempat tissue dan keranjang.

Pendampingan pelaksana pembuatan kerajinan di Desa Krinjing dilakukan untuk memberikan arahan, mengajarkan dan melatih para warga untuk belajar. Proses pendampingan atau pengawasan ini dilakukan agar peningkatan potensi sumber daya alam bisa terpantau, apakah bisa berjalan sesuai rencana, sesuai tujuan yang diinginkan atau adanya kendala-kendala yang menghambat proses terlaksananya kegiatan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Aditya M.F selaku bidang II Dispermades Dukcapil:

“Proses pengawasan atau pendampingan ini dilakukan agar warga belajar tentang pemanfaatan potensi yang ada disekitar, seperti halnya pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk dijadikan kerajinan, menciptakan batik khas Desa, dan Pengolahan kopi arabika. Jika semua dikerjakan dengan ulet dan telaten maka akan menghasilkan nilai ekonomis sehingga mampu menambah penghasilan, serta dapat mengisi waktu luang di rumah” (Hasil wawancara, Aditya M.F selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/10.43).

Kegiatan yang berlangsung hingga saat ini mampu menarik minat masyarakat Desa Krinjing untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. total ada 47 warga yang

bergabung untuk mengikuti kegiatan tersebut diantaranya Ibu-ibu PKK, pemuda karang taruna, serta masyarakat Desa Krinjing. Berikut daftar keseluruhan yang mengikuti kegiatan pendampingan program Desa Binaan:

No	Nama	Alamat
1	Untung	Dusun Depok RT 01/01, Krinjing
2	Ida Susanto	Dusun Depok RT 01/01, Krinjing
3	Usman	Dusun Depok RT 11/02, Krinjing
4	Suhat	Dusun Rejosari RT 16/03, Krinjing
5	Sahun	Dusun Rejosari RT 14/03, Krinjing
6	Witro	Dusun Krinjing RT 23/04, Krinjing
7	Nursanto	Dusun Krinjing RT 30/06, Krinjing
8	Pujisari	Dusun Rejosari RT 07/03, Krinjing
9	Dewi Yulia	Dusun Krinjing RT 02/01, Krinjing
10	Ratna Indriyanti	Dusun Krinjing RT 02/01, Krinjing
11	Susilowati	Dusun Krinjing RT 02/01, Krinjing
12	Suprihati	Dusun Krinjing RT 11/04, Krinjing
13	Sirwati	Dusun Krinjing RT 08/02, Krinjing
14	Warmono	Dusun Krinjing RT 08/02, Krinjing
15	A. Supyan	Dusun Gumawang RT 04/03, Krinjing
16	Afi Sunani	Dusun Gumawang RT 04/03, Krinjing
17	Sabar Fitriyah	Dusun Gumawang RT 11/03, Krinjing
18	Maryatul	Dusun Gumawang RT 06/06, Krinjing
19	Mugi	Dusun Gumawang RT 06/06, Krinjing
20	Siti N	Dusun Depok RT 13/03, Krinjing
21	Yuni	Dusun Depok RT 13/03, Krinjing
22	Ribut	Dusun Depok RT 09/01, Krinjing
23	Riyanti	Dusun Depok RT 16/04, Krinjing
24	Tumpiyati	Dusun Depok RT 16/04, Krinjing
25	Sabar	Dusun Depok RT 02/03, Krinjing
26	Mahtini	Dusun Rejosari RT 07/03, Krinjing
27	Karwati	Dusun Rejosari RT 04/03, Krinjing

28	Pariyah	Dusun Rejosari RT 04/03, Krinjing
29	Rumiastusi	Dusun Rejosari RT 04/03, Krinjing
30	Homsiasi	Dusun Rejosari RT 06/02, Krinjing
31	Suliasih	Dusun Rejosari RT 10/02, Krinjing
32	Hati	Dusun Rejosari RT 10/02, Krinjing
33	Mustakimah	Dusun Rejosari RT 10/02, Krinjing
34	Susiliwati	Dusun Rejosari RT 10/02, Krinjing
35	Dewi Y	Dusun Krinjing RT 12/04, Krinjing
36	Lia	Dusun Krinjing RT 12/04, Krinjing
37	Neni	Dusun Krinjing RT 09/04, Krinjing
38	Sustiyati	Dusun Krinjing RT 01/05, Krinjing
39	Purniati	Dusun Krinjing RT 07/05, Krinjing
40	Tumfiati	Dusun Krinjing RT 07/05, Krinjing
41	Sabar	Dusun Krinjing RT 11/02, Krinjing
42	Dian	Dusun Krinjing RT 11/02, Krinjing
43	Fitriya	Dusun Gumawang RT 11/02, Krinjing
44	Anikotul	Dusun Gumawang RT 11/02, Krinjing
45	Maryatul	Dusun Gumawang RT 09/03, Krinjing
46	Sabarniah	Dusun Gumawang RT 06/03, Krinjing
47	Sumarsih	Dusun Gumawang RT 04/01, Krinjing

*Sumber Buku catatan Desa Krinjing 2019*

Nama-nama yang tertera pada tabel diatas merupakan warga Desa Krinjing mereka mengikuti jenis kegiatan yang berbeda-beda, diantaranya mengikuti kegiatan pembuatan sapu glagah, sapu lidi, kerajinan dari bahan plastik bekas, membuat, dan pembuatan kopi arabika.

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Bila kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa hal itulah salah satu penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya.

Sedangkan dalam dunia kerja, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itu terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Krinjing masih kategori rendah dikarenakan banyaknya lulusan SMP/MTS yang memilih bekerja merantau ke kota-kota besar dibanding melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dalam hal ini Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pemuda-pemudi dan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang tinggi.

### 3. Kesehatan

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Kesehatan merupakan standart hidup minimum yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Kesehatan masyarakat yang cenderung baik akan berdampak pada produktivitas dan etos kerja yang meningkat.

Permasalahan yang dihadapi Desa Krinjing yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai jamban serta fasilitas umum lainnya, hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius sehingga Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah menjalin beberapa CSR perusahaan guna percepatan program Desa Binaan. Bantuan secara langsung yaitu: Fasilitas pembentukan Bumdes dan Bumdesmas dan fasilitas pembentukan pasar desa. Dibentuknya fasilitas Desa bertujuan untuk meningkatkan roda perekonomian yang ada desa, melalui pasar dan Bumdes masyarakat bisa memasarkan hasil produksi dan hasil alam yang ada di Desa Krinjing. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Aditya M.F selaku bidang II Dispermades Dukcapil

“Harapan kami dengan adanya program desa binaan melalui pendampingan dan pembinaan di Desa Krinjing bisa terus berkembang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing, Dispermades Dukcapil juga menjalin kemitraan dengan beberapa CSR untuk pengembangan dan mempercepat, serta dengan adanya fasilitas pasar desa dan Bumdes lapangan pekerjaan semakin bertambah dan masyarakat bisa bekerja. diharapkan kondisi ekonomi masyarakat semakin bertambah dan angka kemiskinan yang ada di Desa Krinjing semakin berkurang. Tidak hanya itu, penyaluran bantuan jambanisasi dari CSR PT. Jamkrida Jateng, bantuan jambanisasi dari SPBE, bantuan jambanisasi dari PLN, bantuan Alquran dan buku bacaan dari CV. Aneka Ilmu, pasang listrik gratis dari PLN, televisi dari bidang Admin Pemdes Dispermades Dukcapil Jateng, tas sekolah dari CV.

Bintang Tiga Utama, bantuan RTLH dari Baznas, jambanisasi dari Baznas, bantuan sepatu sekolah dari CV. Violatama Inti Sejati, Bantuan Kube Fm Kemensos RI, bantuan pembangunan masjid dari Baznas, dan RTLH dari Pemprov Jateng yang diprakasai oleh Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah”(Hasil wawancara, Aditya M.F selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/10.43).

Dengan beberapa bantuan yang diberikan oleh pihak CSR harapanya masyarakat bisa lebih hidup sehat, sehingga kebersihan dan kesehatan bisa selalu terjaga dengan baik.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI**  
**PROGRAM DESA BINAAN DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI JAWA**  
**TENGAH DI DESA KRINJING KECAMATAN WATUMALANG**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**A. Pelaksanaan Program Desa Binaan di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.**

kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan kesejahteraan sosial ini dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial (Rohiman. 2016: 38).

UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Fahrudin. 2014:10).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekda. Dispermades Dukcapil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil di Desa Krinjing merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, dengan memberikan bantuan sarana prasarana, memberikan fasilitasi, melakukan pendampingan, dan pembinaan kepada masyarakat. Dalam praktiknya nilai-nilai dakwah bilhal terkandung didalamnya. Dakwah bilhal merupakan dakwah dengan aksi nyata. Dakwah ini dilakukan dengan membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi

serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Dakwah bilhal diantaranya pemberdayaan masyarakat dengan metode kelembagaan (Aziz. 2004: 378). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing tidak lepas dengan menerapkan Tahapan-tahapan Program Desa Binaan diantaranya adalah (1) Tahap perencanaan Tahap persiapan melakukan tiga hal; *Pertama*, Survei atau menentukan lokasi mitra untuk memperkuat kegiatan rill apa saja yang perlu dilakukan kedua mitra. *Kedua*, evaluasi permasalahan berupa penentuan solusi yang ditawarkan dengan kesepakatan bersama agar adanya persamaan persepsi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. *Tiga*, persiapan materi dan kelengkapan peralatan untuk melaksanakan kegiatan. (2) Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan, (3) Tahap Evaluasi. Ketiga tahapan tersebut sudah dilakukan oleh Dispermades Dukcapil dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat pernyataan yang diperoleh dari lapangan, yakni:

#### 1. Tahap perencanaan

Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat atau kelompok sasaran. Masyarakat umumnya menyadari permasalahan-permasalahan mereka sendiri meskipun hal itu tidak diungkapkan. Tahapan ini dilaukan dengan Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan dan bentuk program bantuan yang nantinya akan diberikan.

Pada tahapan ini Dispermades melakukan penyusunan dokumen atau strategi untuk penanggulangan kemiskinan, penyusunan dokumen dilakukan dengan cara melakukan survei langsung yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019 untuk mencari data terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dan mendata jumlah warga miskin yang ada di Desa Krinjing. Data yang diterima Dispermades terdapat 777 KK miskin, namun setelah diverifikasi dan pengecekan ke lapangan secara langsung berkurang sekitar 193 KK antara lain karena sudah mampu, meninggal dan pindah, namun demikian ada 57 kk miskin yang selama ini tidak masuk data miskin. Dengan melihat hasil lapangan tersebut Dispermades memberikan program Desa Binaan kepada Desa Krinjing guna Kemiskinan bisa berkurang. Sebagaimana penuturan Bapak Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil:

“Dari data yang kita terima sebanyak lebih dari 500 KK miskin yang ada di Desa Krinjing. Kategori tersebut menjadikan Desa Krinjing masuk kedalam



kategori Desa miskin. Dalam hal ini Dispermades Dukcapil memberikan program Desa Binaan guna untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Krinjing” (Hasil wawancara dengan Bapak Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/09.08).

Permasalahan yang terjadi di Desa Krinjing juga dibenarkan oleh sekretaris desa Krinjing yang menuturkan bahwa Desa Krinjing termasuk Zona merah kemiskinan hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengoptimalan diri, dan banyaknya pengangguran. Ia menuturkan bahwa:

“Kemiskinan yang ada di Desa Krinjing dilatar belakangi permasalahan kurangnya masyarakat dalam mengoptimalkan diri dan pengangguran yang masih banyak, sehingga Desa Krinjing termasuk Zona merah kemiskinan. Pendampingan sangat dibutuhkan, karena program Desa Binaan sangat membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Krinjing ini” (Hasil wawancara Bapak Dukendro selaku Sekretaris Desa Krinjing, 02/05/2020/10.47).

Pernyataan Bapak Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil dan Bapak Dukendro selaku Sekretaris Desa Krinjing memiliki arti bahwa Program Desa Binaan di Desa Krinjing pada tahap ini sudah sesuai dengan tahap awal dalam program Desa Binaan yakni tahap perencanaan. Kesadaran masyarakat yang masih kurang mengingat kondisi yang masih ada di garis kemiskinan, sehingga pemerintah Desa Krinjing mengharapkan pendampingan dan advokasi kepada Dispermades Dukcapil.

## 2. Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan

Tahap pelaksanaan dan pendampingan yang diimplementasikan Dispermades Dukcapil dengan kegiatan Desa Binaan dilaksanakan pada bulan maret 2019 diawali pendekatan dengan masyarakat, kegiatan tersebut dilaksanakan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Bidang administrasi pemerintahan desa selama 5 tahun kedepan. Untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahap pendampingan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan aktivitas seluruh kegiatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil provinsi Jawa Tengah:

“Guna menyusun program peningkatan kapasitas kesejahteraan masyarakat, perlu diketahui peta permasalahan dan potensi yang ada di wilayah sekitar yang menjadi target sasaran pembekalan dan bantuan khususnya Desa Krinjing. Penyusunan pelaksanaan program pembekalan dan pemberian

bantuan tersebut disesuaikan dengan melihat potensi dan melihat keadaan masyarakat, serta permasalahan yang menjadi latar belakang adanya program Desa Binaan di Desa Krinjing diantaranya: Pengangguran yang semakin bertambah, lapangan pekerjaan yang semakin berkurang, tingkat pendidikan yang rendah, sehingga menjadikan desa krinjing masuk kriteria Desa miskin” (Hasil wawancara, Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/09.10).

### 3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang dilakukan secara terus menerus. Baik secara formal atau semi formal pada proses menjalankan program Desa Binaan maupun secara informal setiapbulan, mingguan, atau harian. Pada tahap ini Dispermades Dukcapil juga melaksanakan evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan sekali sejak berjalan pada bulan maret 2019 sampai sekarang. Evaluasi sudah dilakukan sebanyak 9 kali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Puput selaku bidang II menuturkan bahwa:

“Evaluasi satu bulan sekali dilaksanakan setiap ada rapat dengan pimpinan Dispermades Dukcapil, evaluasi juga dilaksanakan di tingkat Desa kemudian disampaikan kepada Dispermades Dukcapil terkait capaian program Desa Binaan” (Hasil wawancara dengan Mas Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/10.10).

Berdasarkan informan tersebut bahwa Dispermades Dukcapil maupun pemerintah Desa telah melakukan evaluasi. Adapun yang dievaluasi Dispermades Dukcapil seperti belum optimalnya individu dalam meningkatkan kapasitas diri. Hal ini membuktikan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Dispermades Dukcapil sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan program Desa Binaan.

## **B. Hasil Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.**

Desa Binaan atau juga sering disebut dengan istilah Desa Mitra Kerja merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang berusaha membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan (Dirjen pembinaan kelembagaan agamaislam. 2001: 2).

Tujuan umum Desa binaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bisa membangun desa mereka secara swadaya dan dapat merealisasikan cita-cita, keinginan, dan kebutuhan mereka di dalam pembangunan desa mereka sendiri. Sedangkan tujuan operasionalnya adalah membantu mengembangkan sumber mata pencaharian masyarakat melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan serta

meningkatkan kadar swadaya masyarakat sebagai landasan yang kuat untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang lebih baik (Dirjen pembinaan kelembagaan agamaislam. 2001: 3).

Program Desa Binaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengentaskan dari kemiskinan akan tetapi juga menciptakan peluang usaha baru, sehingga masalah pengangguran juga dapat teratasi. Upaya Program Desa Binaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, potensi tersebut dapat berupa potensi diri maupun potensi alam.

Dispermades Dukcapil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, upaya tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan pengangguran yang ada. Jumlah pengangguran yang didominasi oleh anak-anak muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah, dan lainnya merupakan pulang dari perantauan.

Peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Dispermades Dukcapil terhadap masyarakat Desa Krinjing tidak hanya mengatasi persoalan pengangguran, melainkan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Dengan memperkuat peran BumDes dan mengoptimalkan peran serta PKK, Karang Taruna, dan pemuda lainya atau kelompok-kelompok lainnya. melalui program Desa Binaan mereka diberikan pendampingan dan pembinaan untuk memperbaiki potensi diri maupun potensi alam yang ada.

Program Desa Binaan di Desa Krinjing sejauh ini sudah baik, hal ini dapat dilihat dari antusias PKK, Karang Taruna, pemuda, dan masyarakat . dalam program Desa Binaan yang sesuai dengan tahapan-tahapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Masyarakat yang tadinya masuk dalam kategori masyarakat miskin, kini sudah mulai meningkat. Mereka mampu menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah didapatkan melalui program Desa Binaan Dispermades, seperti halnya produksi sapu glagah yang semakin banyak di produksi, pengolahan kopi arabika pemasaran dengan cara lewat BumDes maupun pasar online saat ini mengalami peningkatan, hasil membatik yang menjadikan batik lokal Desa Krinjing, serta adanya pasar desa yang memudahkan akses masyarakat untuk menjual serta meningkatkan sektor ekonomi masyarakat.

Hasil Program Desa Binaan yang dilakukan oleh Dispermades Dukcapil di Desa Krinjing sesuai dengan indikator- indikator Kesejahteraan sosial. Adapun tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Berikut hasil program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

## 1. Ekonomi

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi dengan masyarakat sebagai pelakunya, mengelola sumberdaya apapun secara swadaya, guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarga (Herawati, 2014: 17). Upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dengan cara mendorong, memotivasi, dan menggali sumberdaya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga kesejahteraan hidup dapat dicapai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil.

“Dalam hal ini kami memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna dalam pemanfaatan sumberdaya alam, pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai, seperti halnya, membuat kerajinan sapu glagah, membatik, dan bagaimana pengolahan kopi arabika. dari kegiatan tersebut nantinya diharapkan masyarakat bisa lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan nilai ekonomis, sedangkan dari kegiatan membatik, rencananya hasil batik dari Desa Krinjing akan dijadikan batik khas lokal sehingga bisa produksi dalam skala banyak. Untuk mengolah hasil perkebunan kopi pemuda sudah mahir dalam menjalankan bagaimana pengolahan kopi arabika sehingga nantinya produk kopi setempat bisa menembus pasaran yang lebih luas”(Hasil wawancara, Puput selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/09.55).

Dengan adanya program Desa binaan Dispermades Dukcapil, harapannya bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Krinjing, sebagaimana dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada bapak mulno selaku Kepala Desa Krinjing. Ia meuturkan bahwa:

“Kemiskinan yang ada di Desa krinjing mengalami penurunan sebanyak 19,7% dari total jumlah data miskin sebanyak 641 KK miskin”( Hasil wawancara dengan Bapak Mulno selaku kepala Desa Krinjing, 28/04/2020/10.38).

Sebagaimana diperkuat oleh Bapak Dukendro selaku Sekertaris Desa Krinjing, ia menuturkan bahwa:

“Untuk jumlah kemiskinan yang ada di Desa Krinjing mengalami penurunan kisaran 19,7 % dikarenakan kami telah mengkaji ulang dengan mengadakan MOSDUS tiap tingkat RT, RW, Dusun, bahkan MUSDES tingkat Desa, Dan kami menggali lagi data tersebut. Nama- nama orang kami validasi lagi dan yang kami temukan dilapangan banyak warga, banyak masyarakat yang sebelumnya sudah tidak lagi layak masuk dalam DTKS dan kami anggap mereka sudah mampu, sehingga mengalami penurunan sebesar 19,7 % (Hasil wawancara dengan Bapak Dukendro selaku Sekertaris Desa Krinjing, 02/05/2020/10.52).

Hasil Program Desa Binaan Dispermades menurut peneliti sudah sesuai guna menaikkan taraf ekonomi masyarakat sesuai dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menaikkan ekonomi masyarakat Dispermades Dukcapil memberikan pelatihan dan pembekalan guna untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Langkah awal Dispermades Dukcapil dalam meningkatkan ekonomi yaitu menyusun program terkait peningkatan kapasitas kesejahteraan masyarakat, agar dapat mengetahui permasalahan dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Dalam menyusun pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan perlu menyesuaikan dengan melihat potensi dan melihat keadaan masyarakat, serta permasalahan yang menjadi latar belakang dengan adanya program Desa Binaan di Desa Krinjing.

Berikut hasil program Desa Binaan Dispermades Dukcapil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat:

a. Hasil Kerajinan Limbah Glagah

Hasil dampingan Dispermades dalam pembuatan sapu glagah sangat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengolah potensi alam sekitarnya menjadi hal yang berguna dan menjadikan nilai ekonomis. Peran dari pelaksanaan pendampingan pembuatan sapu glagah bisa dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, sesuai pernyataan dari Mas Warmono selaku koordinator pengrajin limbah glagah:

“ Sangat bermanfaat sekali mas, saya merasakan ada peningkatan yang cukup signifikan dalam segi ekonomi setelah menelateni membuat sapu glagah ini. Melihat semakin hari jumlah permintaan yang bertambah membuat saya dan masyarakat disini bisa membuat lebih banyak lagi, dari segi ekonomi lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat disini sangat terbantu dengan adanya pendampingan

Dispermades Dukcapil”(Hasil wawancara dengan mas Warmono selaku koordinator pembuat sapu glagah, 05/05/2020/12.06).

Keterangan serupa juga disampaikan oleh mbak puji selaku warga yang mengikuti kerajinan glagah, ia menuturkan bahwa sangat senang dengan adanya pendampingan dalam kerajinan sapu glagah, ia mengakui ada peningkatan ekonomi sehingga ia bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Berikut penuturannya:

“Menurut saya dengan adanya pendampingan pembuatan sapu glagah ini banyak manfaat yang saya dapatkan, selain bisa menghasilkan nilai ekonomis juga saya bisa mengetahui manfaat alam yang bisa digunakan sebagai bahan baku yang sebelumnya tidak terfikirkan. Hasil upah yang saya dapatkan bisa saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dirumah”(Hasil wawancaradengan mbak puji salah satu warga yang mengikuti kerajinan sapu glagah, 05/05/2020/08.12).

Pernyataan kedua informan tersebut menegaskan bahwa ada proses pelaksanaan dan pendampingan di Desa Krinjing, dengan pendampingan kerajinan sapu glagah sangat penting dan berpengaruh di dalam masyarakat, pendampingan kerajinan pembuatan sapu glagah dapat memberikan lapangan pekerjaan masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya pendampingan kerajinan pembuatan sapu glagah yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghasilan dilihat dari tercukupinya sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

a. Kerajinan membuat sapu lidi

Untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat desa Krinjing, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan pemberdayaan melalui kerajinan produk Sapu Lidi. Hasil dari produk ini dipasarkan di luar wilayah Wonosobo. Dalam 1 hari mampu produksi 5 sapu lidi perorang.

Dengan adanya kerajinan pembuatan sapu lidi tersebut menegaskan bahwa proses pelaksanaan dan pendampingan Desa Binaan Dispermades Dukcapil mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. hal ini sudah sesuai dengan tahap pelaksanaan dan pendampingan.

b. Hasil Kerajinan Bunga Plastik dari limbah kantong plastik

Ibu-ibu PKK desa Krinjing yang dipimpin Ibu Kepala Desa Krinjing, telah memanfaatkan limbah plastik untuk menjadi rangkaian bunga plastik yang

menarik. Kegiatan ini tidak lepas dari pendampingan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang disampaikan ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, ia menyampaikan bahwa:

“pertama kali diadakanya kegiatan pembuatan kerajinan bunga plastik yaitu dengan perencanaan kemudian kami mengadakan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik yang ada di lingkungan kita, selanjutnya kita upayakan bagaimana caranya supaya sampah tersebut tidak mengganggu lingkungan kita. Tujuannya limbah plastik tidak terlalu banyak dan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Krinjing” (Hasil wawancara dengan Ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, 06/05/2020/13.22).

Dengan demikian peran PKK mengajak masyarakatnya untuk menjaga lingkungan sangat berarti, dengan memanfaatkan limbah plastik untuk dijadikan kerajinan bunga yang sangat menarik, upaya tersebut mendorong masyarakat agar lebih menjaga lingkungannya agar tetap terjaga dan masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai hiasan di dalam rumah, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengisi waktu luang. Harapan masyarakat proses pendampingan dan advokasi dari Dispermades Dukcapil nantinya bisa mendorong masyarakat agar lebih produktif.

c. Hasil pelatihan membuat batik

Dalam pelaksanaan pembinaan desa binaan, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah menggandeng akademisi dalam hal ini Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) untuk memberikan pelatihan membuat batik bagi para warga khususnya ibu-ibu PKK desa Krinjing meski saat ini masih dalam tahap proses pembelajaran namun telah mampu menghasilkan produk batik khas Desa Krinjing. Sebagaimana yang disampaikan ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, ia menyampaikan bahwa:

“Hasil dari pelatihan membuat batik sangat mendukung sekali buat masyarakat krinjing, hal itu menjadi kebutuhan desa yang perlu adanya inovasi, desa juga perlu kemajuan, desa perlu keterampilan yang lebih, yang jelas untuk meningkatkan sumber daya manusia supaya sebatas pengertian ibu-ibu tidak hanya itu saja akan tetapi lebih bisa mengenal batik, oh ternyata kita yang beli batik dengan harga mahal-mahal kita bisa membuatnya sendiri bahkan untuk keluarganya dan kita bisa untuk mengembangkan batik khas yang kita punyai” (Hasil wawancara dengan Ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, 06/05/2020/13.22).

Dengan adanya pelatihan membuat tersebut menegaskan bahwa proses pelaksanaan dan pendampingan Desa Binaan Dispermades Dukcapil mampu meningkatkan potensi diri masyarakat masyarakat, dengan dorongan dan keinginan yang kuat mampu memberikan semangat bagi masyarakat khususnya ibu-ibu PKK yang ada di Desa Krinjing. Hal ini sudah sesuai dengan tahap pelaksanaan dan pendampingan.

d. Hasil Olahan Kopi Arabika Desa Krinjing

Karang Taruna desa Krinjing telah berkiprah untuk memajukan Desa Krinjing berupa pengolahan kopi Arabika khas Desa Krinjing. Melalui pendampingan pemberdayaan dari Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah para pemuda mampu berkreasi menghasilkan kopi yang saat ini menjadi tren.

Salah satu praktik program Desa Binaan Dispermades Dukcapil di Desa Krinjing adalah pendampingan bagi pemuda dan remaja untuk pengolahan kopi arabika, banyaknya hasil perkebunan kopi yang ada di Desa Krinjing mampu menggerakkan pemuda dan kelompok-kelompok remaja untuk mengolahnya menjadi kopi arabika, tentunya akan menjadikan harga jual kopi lebih tinggi, apalagi dukungan penuh dari pemerintah desa melalui Bumdes serta memanfaatkan media pasar online seperti ini. Seperti halnya hasil wawancara dengan mas untung selaku koordinator pengolah kopi arabika ia menuturkan bahwa:

“banyaknya komoditas petani yang menanam kopi membuat saya dan teman-teman untuk bergerak mengolahnya menjadi hasil olahan kopi arabika, karena sebelumnya belum ada warga disini yang bisa mengolahnya dan biasanya dijual langsung dengan harga yang murah. karena dengan pengolahan kopi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan membawa nama Desa Krinjing lewat kopi” (Hasil wawancara dengan mas Untung selaku ketua Karang Taruna Desa Krinjing, 27/04/2020/09.40).

Pernyataan mas Untung selaku koordinator pengolahan kopi arabika memiliki arti bahwa dengan memaksimalkan sumberdaya alam mampu menciptakan peluang bisnis yang baru, sehingga kelompok-kelompok remaja yang tadinya menganggur kini bisa bergerak bersama mengolah kopi arabika, hal ini sesuai dengan tahap pelaksanaan dan pendampingan Dispermades Dukcapil dalam pelaksanaan program Desa Binaan.



e. Hasil Kerajinan Plastik Bekas Minuman

Untuk meningkatkan produktivitas ibu-ibu warga desa Krinjing, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah memberikan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pemanfaatan limbah sampah plastik bekas minuman kemasan gelas untuk dibuat tas, tempat tissue dan keranjang. Sebagaimana yang disampaikan ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, ia menyampaikan bahwa:

Dilihat dari kebersihan lingkungan, kita memanfaatkan barang yang harusnya membahayakan tapi kita olah dan kita berfikir sejenak ternyata barang yang sudah tidak berguna bahkan membahayakan bagi lingkungan sekitar kita itu ternyata bisa itu bisa membantu kehidupan kita ketika kita bisa memanfaatkannya” (Hasil wawancara dengan Ibu Rumiastuti selaku ketua PKK Desa Krinjing, 06/05/2020/13.22).

Dengan demikian peran Ibu-ibu untuk menjaga lingkungan sangat berarti, banyaknya limbah sampah plastik bekas minuman yang dibuang sembarangan mampu dimanfaatkan menjadi barang yang sangat berguna. Dengan memanfaatkan limbah plastik bekas minuman untuk dijadikan kerajinan seperti tas, tempat tissue, dan keranjang upaya tersebut mendorong masyarakat agar lebih menjaga lingkungannya agar tetap terjaga dan masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai hiasan di dalam rumah, bahkan bisa digunakan buat wadah barang bawaan. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengisi waktu luang. Harapan masyarakat proses pendampingan dan advokasi dari Dispermades Dukcapil nantinya bisa mendorong masyarakat agar lebih produktif.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Bila kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa hal itulah salah satu penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya.

Menurut peneliti Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah mampu dorongan dan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebab dengan pendidikan yang tinggi maka wawasan dan pengetahuan masyarakat

tinggi, sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan hasil potensi alam yang ada di sekitar.

### 3. Kesehatan

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Kesehatan merupakan standart hidup minimum yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Kesehatan masyarakat yang cenderung baik akan berdampak pada produktivitas dan etos kerja yang meningkat.

Permasalahan yang dihadapi Desa Krinjing yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai Jamban serta fasilitas umum lainnya, hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius sehingga Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah menjalin beberapa CSR perusahaan guna percepatan program Desa Binaan. Bantuan secara langsung yaitu: Fasilitas pembentukan Bumdes dan Bumdesmas dan fasilitas pembentukan pasar desa. Dibentuknya fasilitas Desa bertujuan untuk meningkatkan roda perekonomian yang ada desa, melalui pasar dan Bumdes masyarakat bisa memasarkan hasil produksi dan hasil alam yang ada di Desa Krinjing. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Aditya M.F selaku bidang II Dispermades Dukcapil

“Harapan kami dengan adanya program desa binaan melalui pendampingan dan pembinaan di Desa Krinjing bisa terus berkembang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing, Dispermades Dukcapil juga menjalin kemitraan dengan beberapa CSR untuk pengembangan dan mempercepat, serta dengan adanya fasilitas pasar desa dan Bumdes lapangan pekerjaan semakin bertambah dan masyarakat bisa bekerja. diharapkan kondisi ekonomi masyarakat semakin bertambah dan angka kemiskinan yang ada di Desa Krinjing semakin berkurang. Tidak hanya itu, penyaluran bantuan jambanisasi dari CSR PT. Jamkrida Jateng, bantuan jambanisasi dari SPBE, bantuan jambanisasi dari PLN, bantuan Alquran dan buku bacaan dari CV. Aneka Ilmu, pasang listrik gratis dari PLN, televisi dari bidang Admin Pemdes Dispermades Dukcapil Jateng, tas sekolah dari CV. Bintang Tiga Utama, bantuan RTLH dari Baznas, jambanisasi dari Baznas, bantuan sepatu sekolah dari CV. Violatama Inti Sejati, Bantuan Kube Fm Kemensos RI, bantuan pembangunan masjid dari Baznas, dan RTLH dari Pemprov Jateng yang diprakasai oleh Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah”(Hasil wawancara, Aditya M.F selaku bidang II Dispermades Dukcapil, 03/03/2020/10.43).

Langkah yang digunakan Dispermades Dukcapil dalam mengurangi angka kemiskinan sudah sesuai dengan indikator kesejahteraan yaitu Kesehatan masyarakat terjamin, dengan adanya pembangunan jambanisasi dapat mempermudah akses masyarakat untuk MCK. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat di capai dengan baik. Seperti halnya yang disampaikan Bapak Mulno selaku Kepala Desa Krinjing:

“Program Desa Binaan yang diberikan Dispermades Dukcapil sudah sangat efektif dan akan tetap berkelanjutan hingga Desa Krinjing masuk kedalam zona hijau, namun kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya individu meningkatkan kapasitas diri. Sehingga perlu pendampingan dan advokasi dari Dispermades Dukcapil. Dengan penguatan BumDes Krinjing dapat menjual produk-produk dan hasil olahan akan meningkatkan taraf hidup pendapatan masyarakat. Respon masyarakat sangat luarbiasa mengingat kondisi masih dibawah garis kemiskinan. Pendampingan dan pembinaan dari Dispermades Dukcapil dengan adanya Program Desa Binaan sangat membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Krinjing” ( Hasil wawancara dengan Bapak Mulno selaku Kepala Desa Krinjing, 28/04/2020/10.31).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran dari setiap bab yang penulis sajikan, skripsi yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo oleh Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti menemukan ada tahapan-tahapan kesejahteraan sosial dalam proses pelaksanaan program Desa Binaan oleh Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah diantaranya. Tahap perencanaan berupa penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan dengan cara menggali potensi desa dan menentukan program penanggulangan kemiskinan, tahap pelaksanaan dan pendampingan berupa pemberian pelatihan-pelatihan seperti, Pembentukan Satgas Desa Adat, Fasilitas Regulasi Desa, Fasilitas Penyusunan Profil Desa, Evaluasi Diri Desa, Pemberian Bantuan Operasional KPMD, Pemberian Bantuan Ketahanan Masyarakat Desa, Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, Fasilitasi Sistem Informasi Desa dan tahapan evaluasi sudah sesuai dengan tahapan program Desa Binaan.

2. Hasil Program Desa Binaan Dispermades Dukcapil di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

Program Desa Binaan di Desa Krinjing sudah berjalan dengan baik. Capaian tersebut dilihat dari indikator-indikator kesejahteraan sosial yaitu Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Desa Binaan di Desa Krinjing sudah berjalan cukup baik. Namun agar berjalan lebih baik, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Dispermades Dukcapil provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana program Desa Binaan agar dapat meningkatkan dalam memberikan program dan pelatihan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krinjing. Monitoring dan evaluasi menjadi kegiatan yang sangat penting yang harus dijalankan secara berkala terhadap bidang pelaksana dan pemerintah desa khususnya masyarakat yang mendapatkan pendampingan. Sehingga tujuan mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Krinjing dapat dicapai dengan maksimal.
2. Untuk pemerintah desa agar lebih memantau kegiatan program Desa Binaan yang sudah berjalan. Mengingat peneliti menemukan masih ada warga yang masih kesulitan dalam mengikuti kegiatan tersebut, seperti masih kesusahan dalam membuat, dan bagaimana pemasaran hasil dari kerajinan membuat.
3. Untuk warga yang diberdayakan agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta kreatif. Sehingga bisa mengembangkan bentuk- bentuk kerajinan yang baru.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahi peneliti kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang telah tersusun masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan suatu pengantar)*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PESADA.
- Ayundari, Ratna. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Bhakti Manunggal Di Dusun Tulung Desa Srihardono Bantul Yogyakarta. *Skripsi Publikasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Aziz, Moh. Ali. 2004. *Ilmu dakwah edisi revisi*. Jakarta: Kencana
- Danim, Sudarwan. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Effendi, Noer Tajjudin. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Fahrudin, Andi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Fahrudin, Andi. 2014 Cet ke-2. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhbuan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Focous Grups*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Hikmat, Mahli M. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Khomsa, Ali. 2015. *Indikator Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Mardikanto, Totok. Soebijanto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan publik*. Bandung: Penerbit Afabeta.
- Margono. 2000. *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake sarasin.
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Islam dan Takwa*. Jakarta: AMZAH.

- Rais, Amin. 1995. *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. PPSK Yogyakarta.
- Saefuddin, Asep, dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sarwono, Jonathan. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Elfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta
- Sunartiningsih, Agnes. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Soeharto, Irawan. 2004. *Metodelogi penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soewandi, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soyomukti, Nurani. 2011. *Pengantar Filsafat Umum*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media.

#### Sumber jurnal

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI. 2001. *Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Agama Islam*. Jakarta

#### Sumber internet

[www.Dispermadesdukcapil.co.id](http://www.Dispermadesdukcapil.co.id)

## **LAMPIRAN**

### **A. Lampiran I**

#### **1. Pedoman Observasi**

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil (Dispermades Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah terkait program Desa Binaan di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Untuk memperoleh data yang valid maka peneliti melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengamati letak geografis dan lingkungan Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- b. Mengamati Program Desa Binaan dalam proses peningkatan kesejahteraan oleh Dispermades Dukcapil di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

#### **2. Pedoman Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data dengan menelusuri data yang tersedia. Adapun data tersebut seperti buku-buku, catatan-catatan, surat kabar dan dokumentasi lainnya untuk melihat gambaran kegiatan program Desa Binaan.

- a. Data geografis Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- b. Data Demografi Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- c. Dokumentasi dan foto-foto kegiatan Desa Binaan Dispermades Dukcapil

#### **3. Pedoman Wawancara**

- a. Pertanyaan untuk Bidang II Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah
  - 1) Program apa saja yang dilakukan Dispermades dukcapil jawa tengah dalam menjalankan program Desa binaan di Desa krijing kecamatan watumalang kabupaten wonosobo?
  - 2) Siapa saja yang tergabung/terlibat dalam program Desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah?



- 3) Menurut bapak bagaimana pelaksanaan program Desa binaan Dispermades dukcapil jawa tengah?
  - 4) Bagaimana proses/metode Dispermades dukcapil jawa tengah dalam menjalankan program desa binaan?
  - 5) Kapan program Desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah di laksanakan?
  - 6) Darimana sumber biaya didapatkan dalam menjalankan program Desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah?
  - 7) Hambatan apa saja yang dialami Dispermades dalam melaksanakan program Desa binaan?
- b. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
- 1) Apakah program Desa binaan sudah berjalan dengan baik?
  - 2) Sudah berapa lama program desa binaan berjalan di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?
  - 3) Program apa saja yang diberikan Dispermades Dukcapil Jawa Tengah dalam menjalankan Desa binaan?
  - 4) Apakah program yang diberikan sudah efektif untuk masyarakat?
  - 5) Adakah kendala yang dialami?
  - 6) Apakah sudah menunjang kebutuhan masyarakat dengan adanya program Desa Binaan?
  - 7) Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program Desa Binaan?
  - 8) Menurut bapak bagaimana tanggapannya dengan adanya program Desa Binaan dari Dispermades Dukcapil Jawa Tengah?
  - 9) Dari segi ekonomi masyarakat apakah ada perubahan setelah adanya program Desa binaan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah?
  - 10) Adakah manfaat untuk masyarakat dengan adanya program Desa Binaan di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?
- c. Pertanyaan untuk masyarakat yang mengikuti pelatihan-pelatihan
- 1) Kapan kegiatan Pelatihan kerajinan bunga plastik dari limbah plastik dan pelatihan membuat dilakukan?
  - 2) Bagaimana awal mula berdirinya Pelatihan kerajinan bunga plastik dari limbah plastik dan pelatihan membuat?

- 3) Apakah tujuan berdirinya Pelatihan kerajinan bunga plastik dari limbah plastik dan pelatihan membatik?
- 4) Menurut bapak/ ibu langkah atau strategi apa yang tepat untuk memasarkan produk hasil Pelatihan kerajinan bunga plastik dari limbah plastik dan pelatihan membatik tersebut?
- 5) Bagaimana bentuk pelaksanaan Pelatihan kerajinan bunga plastik dari limbah plastik dan pelatihan membatik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?
- 6) Menurut Bapak/ Ibu, apa saja faktor-faktor apa saja yang mendukung pengadaan program Pelatihan kerajinan bunga plastik dari limbah plastik dan pelatihan membatik?
- 7) Apa saja Kendala atau hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan Pelatihan tersebut?
- 8) Menurut bapak/ ibu apakah Pelatihan kerajinan bunga plastik dari limbah plastik dan pelatihan membatik ini sudah bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar?
- 9) Apa harapan bapak / ibu dengan pengadaan pelatihan ini?
- 10) Berapa jumlah yang dihasilkan dalam pembuatan kerajinan tersebut?

## B. Lampiran II

### Dokumentasi kegiatan program Desa Binaan oleh Dispermades Dukcapil.

Foto bersama Pemerintah Desa Krinjing  
Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo



Foto Bersama Bidang II Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah  
yang memberikan program Desa Binaan



Foto Proses pelaksanaan program Desa Binaan di Desa Krinjing  
Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.  
Kegiatan mengintervensi di Desa Krinjing



Foto pelaksanaan pembangunan jambanisasi dari CSR







Foto pelaksanaan pelatihan kerajinan membuat, pembuatan sapu lidi, kopi arabika, dan kerajinan dari sampah plastik kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu warga Desa Krinjing



*Foto kegiatan membuat*



*Foto kegiatan membuat*



*Hasil kerajinan sapu glagah*



*Foto kegiatan pembuatan kerajinan dari plastik bekas*



*Foto hasil olahan kopi arabika khas Desa Krinjing*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Singgang Saputra  
Nim : 1601046040  
TTL : Demak, 12 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Suwardi  
Nama Ibu : Kasrumiyati  
Alamat Asli : Ds. Mrisen RT02/01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten  
Demak  
Email : Putrasinggang@gmail.com  
Pendidikan Formal :  
1. TK Pamardisiwi  
2. SDN Mrisen 2  
3. SMP N 2 Wonosalam  
4. SMK N 2 Demak  
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 mei 2020

Penulis

Mohamad Singgang Saputra



